



**PERAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

(Studi Kasus: Desa Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo
Tahun 2017/2018)

*The Role of Village Community Empowerment Cadres (KPMD) in Community
Empowerment*

*(Case Study: Sumberkerang Village Gending District Probolinggo Regency in
2017/2018)*

SKRIPSI

Oleh

**Warda Sayyidatun Nisa'
NIM 150910201024**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**PERAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

*(Studi Kasus: Desa Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo
Tahun 2017/2018)*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Warda Sayyidatun Nisa'
NIM 150910201024**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yang tercinta, Bapak Bunadi dan Ibu Marhuma Tussa'diah selaku orang tua saya yang telah memberikan segalanya sehingga saya mampu mencapai pada tahap ini, tanpa kalian saya bukan apa-apa;
2. Kakek dan nenek, tante, serta om saya yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan semangat kepada saya selama mengerjakan proses skripsi;
3. Adik saya yang saya sayangi Noer Malika Mardiah dan Indah Lathifah, sepupu saya Muhammad Ilyas Hidayatullah, serta keponakan saya Putri Lutfiyatul Karomah dan Muhammad Syarif Hidayatullah, yang selalu memberikan hiburan ketika saya sedih dan bosan mengerjakan skripsi;
4. Guru-guruku di TK dan MI Tarbiyatul Islam Sumberkerang, MTS Wali Songo II Sebaung, dan MAN Padjarakan yang telah dengan sabar dalam mendidik dan memberikan ilmu kepada saya;
5. Dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, terutama dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah membimbing dan membantu saya dalam belajar, serta menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup saya, dan
6. Almamater yang selalu saya banggakan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

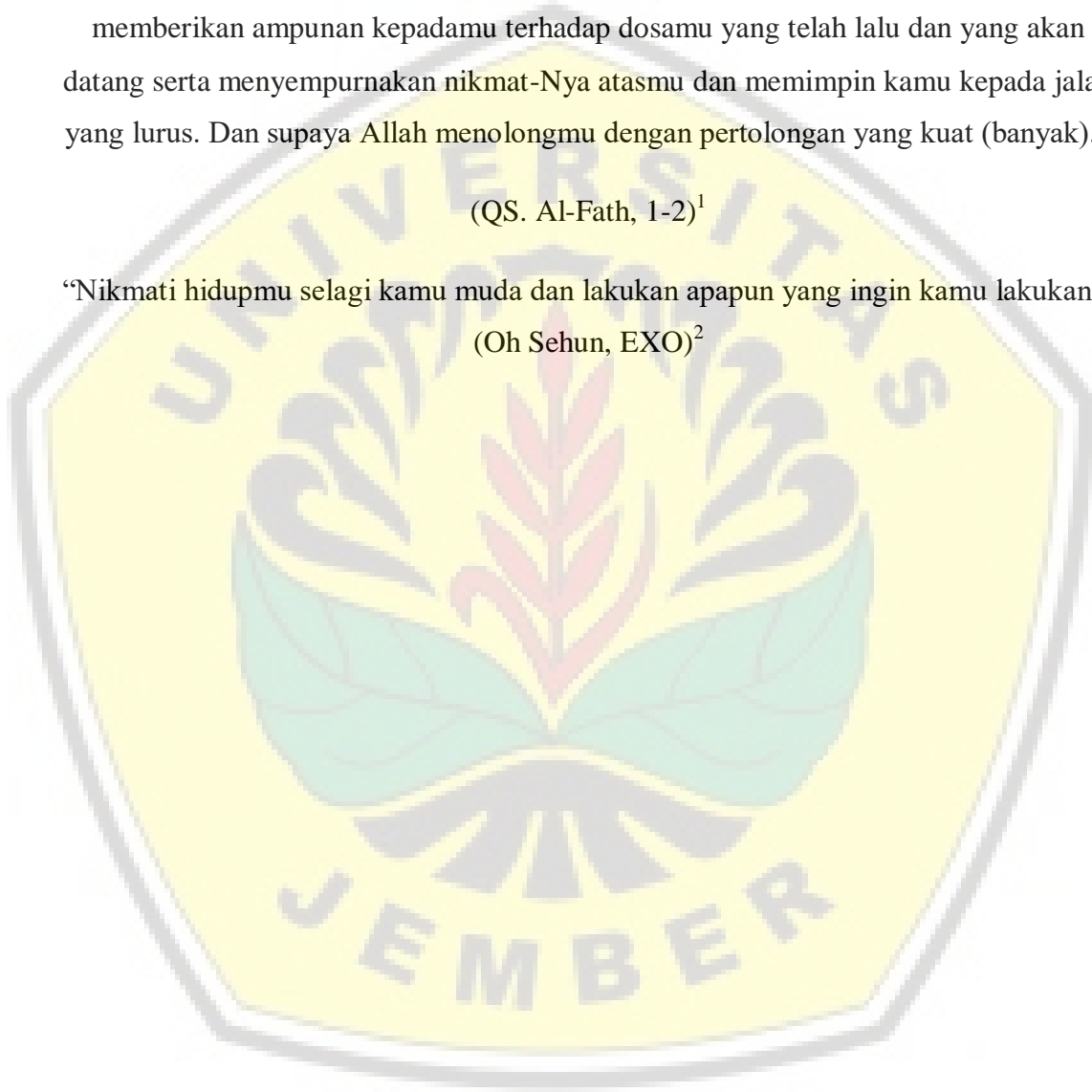
MOTO

“Sesungguhnya, kami telah memberikan kemenangan yang nyata. Supaya Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat (banyak).”

(QS. Al-Fath, 1-2)¹

“Nikmati hidupmu selagi kamu muda dan lakukan apapun yang ingin kamu lakukan.”

(Oh Sehun, EXO)²



¹ <https://tafsirq.com/48-al-fath> (Diakses tanggal 31 Juli 2019, pukul 00:37)

² <https://punkymee.wordpress.com/> (Diakses tanggal 31 Juli 2019, pukul 00:46)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Warda Sayyidatun Nisa'

NIM : 150910201024

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program studi : Ilmu Administrasi Negara

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Desa Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo Tahun 2017/2018)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus saya junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2019
Yang menyatakan

Warda Sayyidatun Nisa'
NIM 150910201024

SKRIPSI

**PERAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

*(Studi Kasus: Desa Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo
Tahun 2017/2018)*

Oleh

Warda Sayyidatun Nisa'

NIM 150910201024

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Anwar, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Boedijono, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Desa Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo Tahun 2017/2018)” karya Warda Sayyidatun Nisa’ telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 27 September 2019

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP
NIP 197410072000121001

Anggota II,

Drs. Boedijono, M.Si
NIP 196103311989021001

Anggota I,

Drs. Anwar, M.Si
NIP 196306061988021001

Anggota III,

Abul Haris Suryo N., S.IP, M.Si
NIP 198210292015041001

Mengesahkan
Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
NIP 196106081988021001

RINGKASAN

Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Desa Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo Tahun 2017/2018); Warda Sayyidatun Nisa', 150910201024; 104 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara; Jurusan Ilmu Administrasi; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dalam pemberdayaan masyarakat. Kajian ini berfokus pada tugas serta fungsi kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) membantu Pemerintah Desa dalam pembangunan desa, khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat. Selain itu, KPMD juga merupakan orang-orang yang bertransformasi di lingkungan desa, karena realitas kerja KPMD sangat luas dimana bukan hanya untuk kegiatan dari bidang pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan merupakan suatu proses atau melakukan suatu hal untuk mencapai tujuan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, peran pendampingan masyarakat desa sangatlah diperlukan agar dapat membantu masyarakat dan Pemerintah Desa untuk membangun desa yang lebih baik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2007 menyatakan bahwa kader pemberdayaan masyarakat merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Desa dan Kelurahan.

Selanjutnya dalam Pasal 10, terdapat 7 (tujuh) pelaksanaan peran KPMD yang merupakan tugas serta fungsinya, yaitu sebagai pendidik, perencana, advokasi dan pelaksana teknis yang di presentasikan dalam 3 (tiga) tahap. KPMD bersama-sama dan di tanggung jawabkan oleh pihak pendampingan desa yang berkedudukan di Kecamatan, sehingga dari peranan KPMD di Desa Sumberkerang ini mendapatkan beberapa penghargaan yang di raih selama mengemban tugas, yaitu pada Tahun 2016 mendapatkan penghargaan dari Kepala Desa Sumberkerang, “peranan dalam

pemberdayaan perekonomian masyarakat guna mensejahterakan masyarakat miskin” dan penghargaan sebagai “juara 1 kader pemberdayaan masyarakat desa berprestasi” di seluruh Kecamatan Gending pada Tahun 2018.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini terdapat pada peran kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dalam pemberdayaan masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap objek penelitian yang di analisis melalui data dan sumber data yaitu sumber data utama diperoleh dari observasi dan wawancara mendalam, serta sumber data tambahan seperti sumber-sumber tertulis (buku referensi, arsip, dan dokumen resmi). Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan tingkat informasi dan data yang telah diambil dari sumber yang berbeda. Teknis analisis data menggunakan model analisis dari Miles & Huberman yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan kesimpulan/verivikasi.

Hasil dari penelitian ini, bahwa di Desa Sumberkerang dalam pelaksanaan pembangunan desa tidak hanya di lakukan oleh pemerintah desa, melainkan ada pihak pendampingan masyarakat desa yaitu kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) serta pihak-pihak yang bersangkutan lainnya. KPMD merupakan representasi dari masyarakat desa yang dipilih oleh kepala desa karena mampu memberikan inovasi baru serta motivasi bagi masyarakat desa. Peran tugas KPMD di Desa Sumberkerang, yaitu sebagai teknis fasilitator dalam musyawarah desa, memberikan penyuluhan dan mengawasi/pendamping dari kegiatan pelatihan dari program pemberdayaan masyarakat, serta menjalankan kerjasama dengan usaha ekonomi produktif.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa, KPMD dalam peranan tugasnya, terdapat tiga tahap yaitu; (1) berpartisipasi dalam pertemuan musyawarah desa (teknisi fasilitator), yaitu KPMD sebagai teknis fasilitasi dalam pertemuan musyawarah berskala lokal desa, dengan menyuarakan aspirasi masyarakat desa,

membantu kelompok masyarakat memperoleh akses pelayanan yang dibutuhkan dan meyakinkan pembuat keputusan untuk mendengar, mempertimbangkan dan mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat. Dari tahap musyawarah berskala lokal desa ini di mulai dari musyawarah dusun, musyawarah desa, dan musyawarah rencana pembangunan desa. Berikutnya membantu dalam pembangunan desa terutama di bidang pemberdayaan masyarakat desa, (2) memberikan penyuluhan bagi masyarakat yang kurang produktif dan mendampingi/mengawasi kegiatan pelatihan. Tahap memberikan penyuluhan untuk masyarakat desa, KPMD memberikan motivasi bagi masyarakat untuk memproduktifkan sendiri agar tidak selalu bergantung dengan adanya dana bantuan dari pemerintah desa, lalu mengajak kelompok masyarakat mengikuti partisipasi dalam kegiatan pelatihan dari program pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh perangkat desa, lalu disambung pada tahap mendampingi/mengawasi dalam kegiatan pelatihan di bidang pemberdayaan masyarakat. (3) menjalankan kerjasama dengan usaha ekonomi produktif, dimana kerjasama tersebut KPMD berdiskusi dengan pihak terkait membantu memperluas produk yang dipasarkan ke luar desa maupun daerah. Tujuan dari adanya kerjasama ini, KPMD ingin pelaku usaha ekonomi di Desa Sumberkerang meluas dan di kenal oleh masyarakat luar, dari keinginan tersebut adanya kesejahteraan tersendiri dari Desa Sumberkerang. Berdasarkan penelitian, ada dua pelaku usaha ekonomi yaitu usaha dibidang pertanian bawang goreng dan usaha yang bergerak dibidang makanan (kuliner).

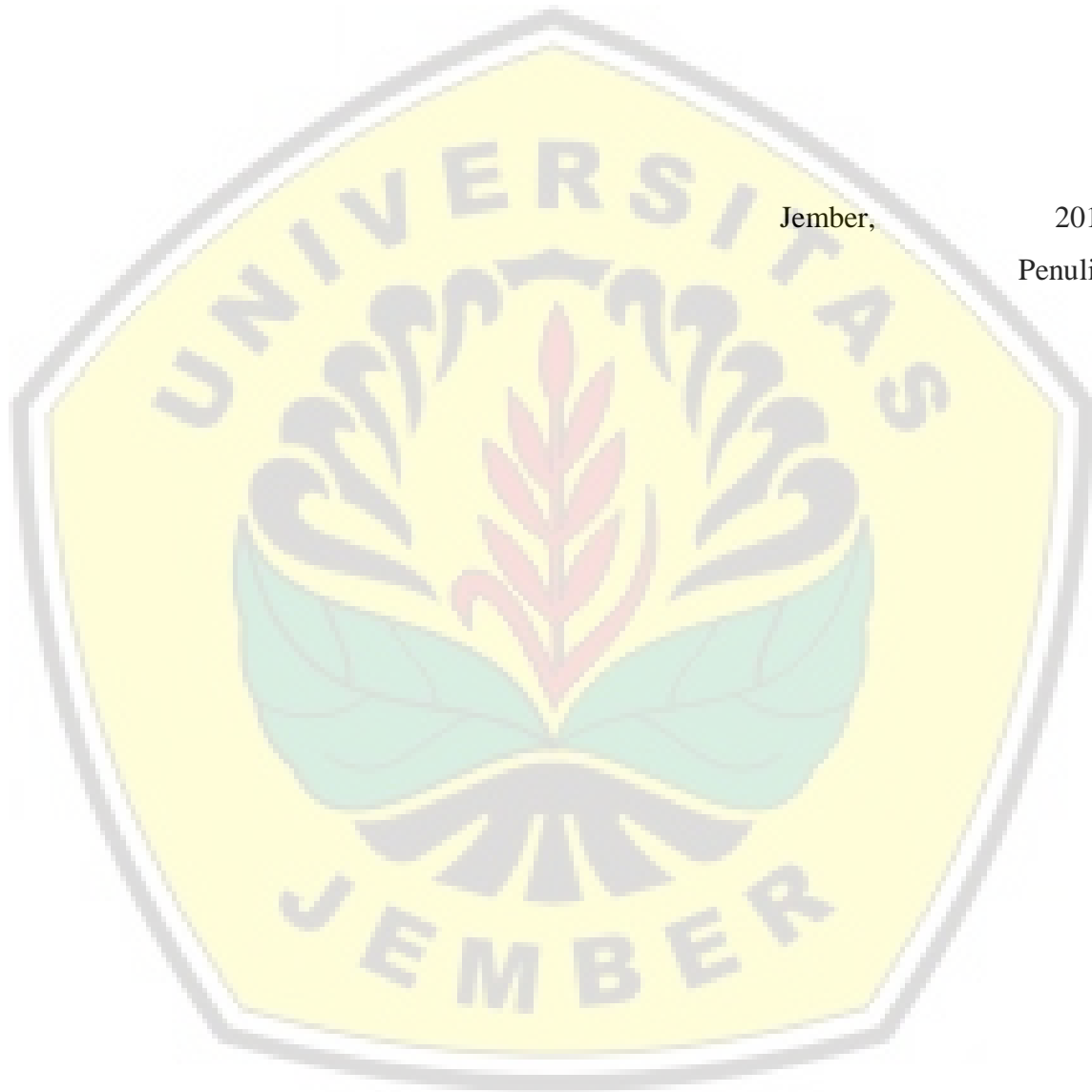
PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT selalu dipanjatkan, karena dengan rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo”. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir dalam menyelesaikan program strata (S1) sekaligus memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penyusunan ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak, sehingga penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si dan Bapak Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Sutomo, M.Si selaku koordinator Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan selaku dosen wali penulis yang senantiasa memberikan nasehat;
4. Bapak Drs. Anwar, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis dengan sabar dengan sikap beliau yang penuh semangat serta keyakinan yang tinggi, menjadikan penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini;
5. Bapak Drs. Boedijono, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah membimbing penulis dengan sabar dalam penyusunan tugas akhir, dan juga telah memberikan masukan pada saat penulis mengalami kebingungan;
6. Tim penguji yang telah berbagi waktu, pikiran, dan tenaganya untuk menguji saya demi kesempurnaan skripsi ini; Kepala Desa dan Perangkat Desa Sumberkerang,

- Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Sumberkerang, serta Pendamping Desa pihak dari Kecamatan Gending yang telah berkenan memberikan ijin penelitian dan membantu dalam keberhasilan penelitian;
7. Bapak Abdul Hidayat, Bapak Eka Wahyudi, Bapak Busahe, Bapak Bambang, Ibu Nanik, Ibu Putri, Bapak Sarito, Ibu Novi, Ibu Sudartik, Ibu Ardian, dan kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan pelatihan yang telah membantu memberikan informasi sebagai bahan penyusunan skripsi ini;
 8. Bapak Ibu dosen Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
 9. seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
 10. teman-teman sekolah sejak taman kanak-kanak (TK) sampai sekolah menengah atas (SMA) yang telah memotivasi demi selesainya tugas akhir ini;
 11. teman-teman kuliah di Program Studi Administrasi Negara 2015, khususnya konsentrasi Pemerintah Daerah yang telah membantu doa, memotivasi dan memberikan solusi dalam penulisan tugas akhir ini;
 12. teman-teman Rusunawi Putri dan kos Mbak Nita lama, yang telah memberikan semangat serta doa;
 13. teman-teman KKN 260 Olean yang senantiasa menjadi tempat berkeluh kesah panulis, memotivasi, menghibur dikala penulis dalam keadaan *down*, dan memberikan dukungan serta doa untuk terselesaikannya tugas akhir ini;
 14. terimakasih kepada EXO terutama bias saya Oh Sehun EXO yang telah menjadi sumber semangat melalui semua karya-nya dikala saya bosan dan jenuh dalam mengerjakan skripsi ini, dan
 15. terakhir untuk teman-teman *online* kelabang EXO (EXOL) Nafa, Kak Galuh, Cici, Eci, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu serta penulis teman dunia *orange* (wattpad) Erika Nadia Elvani dan Ika Lestari Wahyuningsih yang telah mendoakan, memberikan motivasi dan semangat kepada saya selama proses mengerjakan skripsi.

Segala kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis demi penyempurnaan dan kebaikan skripsi ini.



Jember,

2019

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
PENGESAHAN.....	vii
RINGKASAN.....	viii
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Konsep Dasar.....	12
2.1.1 Kelembagaan Pemerintahan Desa	12
2.1.1.1 Pemerintahan Desa	13
2.1.1.2 Pemerintah Desa	13
2.1.2 Konsep Peran	15
2.1.3 Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	17
2.1.4 Konsep Pemberdayaan Masyarakat	20
2.2 Kerangka Pemikiran	23
BAB 3 METODE PENELITIAN	24
3.1 Pendekatan Penelitian	24
3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian	25
3.3 Situasi Sosial	25
3.4 Desain Penelitian	26
3.4.1 Fokus Penelitian	27

3.4.2 Data Dan Sumber Data	27
3.4.3 Informan Penelitian	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data	30
3.5.1 Observasi.....	30
3.5.2 Wawancara.....	30
3.5.2 Dokumentasi	31
3.6 Teknik Keabsahan Data.....	31
3.7 Teknik Analisis Data	32
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Gambaran Umum Desa Sumberkerang	36
4.1.1 Kondisi Geografis Desa Sumberkerang.....	36
4.1.2 Kondisi Demografis Desa Sumberkerang.....	40
4.1.3 Keagamaan Desa Sumberkerang	45
4.1.4 Potensi Sumber Daya Alam Dan Hayati Desa Sumberkerang	45
4.1.5 Visi Dan Misi Desa Sumberkerang	48
4.1.6 Struktur Pemerintah Desa Sumberkerang	50
4.2 Kelembagaan Pemerintahan Desa Sumberkerang	52
4.3 Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sumberkerang.....	56
4.3.1 Berpartisipasi Dalam Pertemuan Musyawarah Desa (Teknisi Fasilitator).....	57
4.3.2 Memberikan Penyuluhan Dan Mengawasi/pendamping Kegiatan Pelatihan	59
4.3.3 Kerjasama Dengan Usaha Ekonomi Produktif	64
4.4 Prioritas Program/Kegiatan Di bidang Pemberdayaan Masyarakat	69
4.5 Peran KPMD Dalam Kegiatan Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat.....	79
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	97
5.1 Kesimpulan.....	97
5.2 Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN	104

DAFTAR TABEL

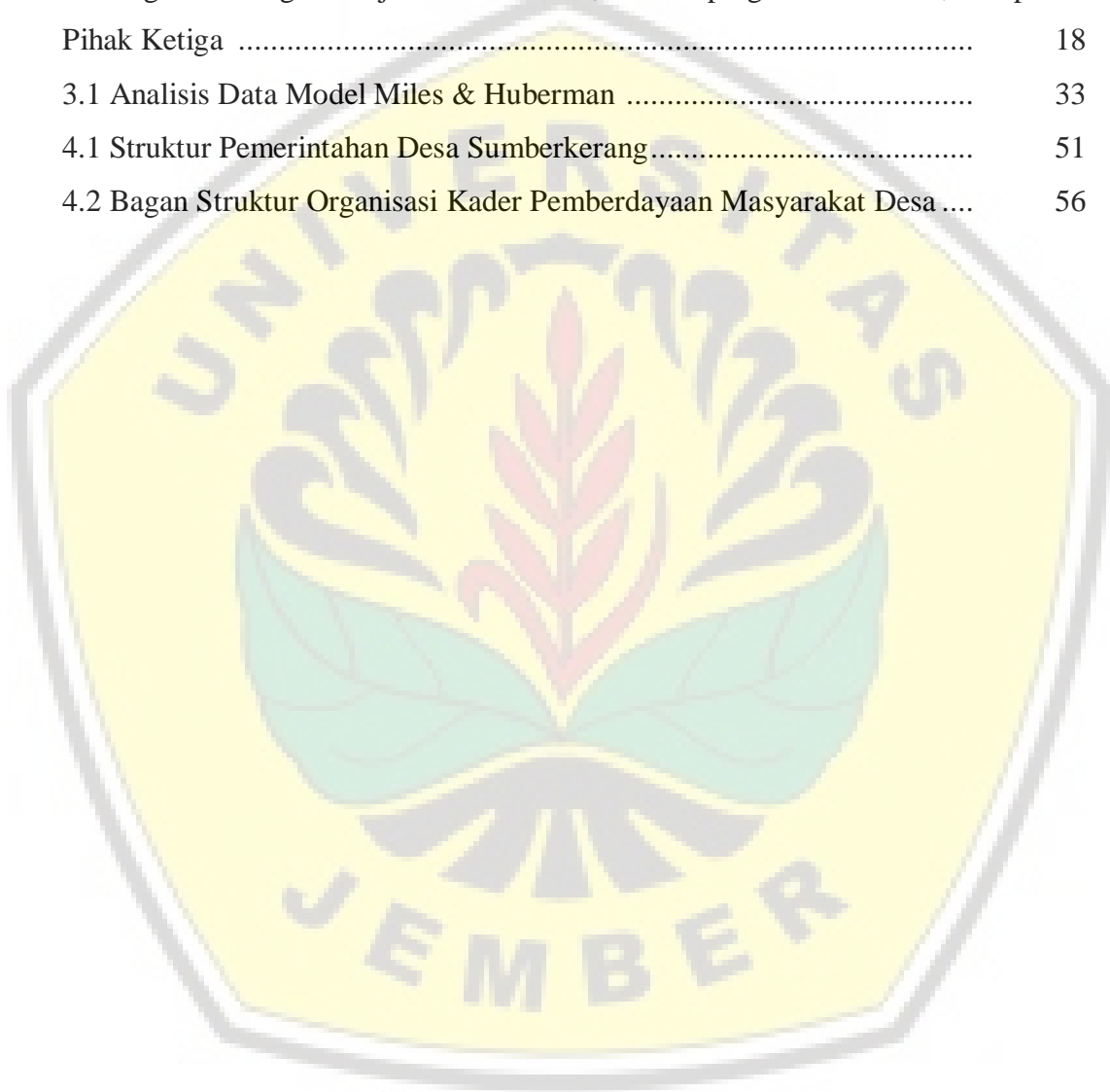
	Halaman
1.1 Daftar Pengangkatan KPMD Tahun 2016-2021.....	4
1.2 Data Penduduk Miskin Desa Sumberkerang Mulai Tahun 2015-2018	7
2.1 Kedudukan Pelaku Pendampingan	19
3.1 Daftar Informan	29
3.2 Ikhtisar Dan Kriteria Keabsahan Data	32
4.1 Luas Wilayah Dengan Rincian Penggunaan	37
4.2 Rincian Tanah Untuk Fasilitasi Perkantoran Dan Umun	38
4.3 Daftar Desa Se-Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo	40
4.4 Jumlah Penduduk Tiap Dusun Tahun 2015.....	41
4.5 Pertumbuhan Penduduk.....	42
4.6 Mata Pencaharian.....	43
4.7 Tingkat Pendidikan	44
4.8 Jumlah Lembaga Pendidikan.....	45
4.9 Luas Tanaman Pangan menurut Komoditas 2015	46
4.10 Hasil Tanaman Dan Luas Tanaman Buah-Buahan Tahun 2015.....	47
4.11 Luas Dan Hasil Perkebunan Menurut Jenis Komoditas Tahun 2015 .	48
4.12 Data Kelembagaan Desa Sumberkerang Tahun 2015-2021	55
4.13 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Musyawarah Dusun	58
4.14 Hasil Identifikasi Masalah Dan Potensi Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat	71
4.15 Program Dan Kegiatan Indikatif Pemberdayaan Masyarakat	73
4.16 Prioritas Program, kegiatan Dan Anggaran Yang Di Kelola Desa Tahun 2017	75
4.17 Prioritas Program, kegiatan Dan Anggaran Yang Di Kelola Desa Tahun 2018	76

4.18 Matrik Indikator Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat	77
4.19 Daftar Nama Pelatihan Membuat Kue Dan Menjahit Tahun 2017.....	81
4.20 Daftar Nama Pelatihan Bawang Goreng Dan Mambatik Tahun 2018	82
4.21 Anggaran Biaya Kegiatan Pelatihan Menjahit	84
4.22 Anggaran Biaya Kegiatan Pelatihan Membuat Kue	85
4.23 Anggaran Biaya Kegiatan Pelatihan Kegiatan Mambatik.....	86
4.24 Anggaran Biaya Kegiatan Pelatihan Bawang goreng	87



DAFTAR BAGAN

	Halaman
2.1 Bagan Hubungan Kerja Antara KPMD, Pendampingan Profesional, maupun Pihak Ketiga	18
3.1 Analisis Data Model Miles & Huberman	33
4.1 Struktur Pemerintahan Desa Sumberkerang.....	51
4.2 Bagan Struktur Organisasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	56



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Peta Desa Sumberkerang.....	39
4.2 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Oleh Pihak KPMD	60
4.3 Kegiatan Pelatihan Membuat Di Desa Sumberkerang Tahun 2018	62
4.4 Kegiatan Pelatihan Di Desa Menjahit Sumberkerang Tahun 2017	62
4.5 Kegiatan Pelatihan Di Desa Membuat Kue Sumberkerang Tahun 2017 ...	63
4.6 Kegiatan Pelatihan Di Desa Bawang Goreng Sumberkerang Tahun 2018	63
4.7 Kerjasama KPMD Dengan Usaha Dibiidang Kuliner	68
4.8 Kerjasama KPMD Dengan Usaha Dibidang Pertanian.....	68
4.9 KPMD Dalam Pelatihan Membuat Kue Tahun 2017	91
3.10 KPMD Dalam Pelatihan Menjahit Tahun 2017.....	91
4.11 KPMD Dalam Pelatihan Membuat Kue Tahun 2018.....	92
4.12 KPMD Dalam Pelatihan Bawang Goreng Tahun 2018	92

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan peran kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dalam pemberdayaan masyarakat. Kajian ini berfokus pada tugas serta fungsi kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) membantu Pemerintah Desa dalam pembangunan desa, khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat. Selain itu, KPMD juga merupakan orang-orang yang bertransformasi di lingkungan desa, karena realitas kerja KPMD sangat luas dimana bukan hanya untuk kegiatan dari bidang pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa tidak bisa lepas dari keberadaan masyarakat, karena adanya pemberdayaan untuk mensejahterakan masyarakat desa.

Pemberdayaan merupakan suatu proses atau melakukan suatu hal untuk mencapai tujuan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, peran pendampingan masyarakat desa sangatlah diperlukan agar dapat membantu masyarakat dan pemerintah desa untuk membangun desa yang lebih baik. Jafar (2015:14) menyatakan dalam bukunya bahwa kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) merupakan representasi dari warga desa yang selanjutnya di pilih dalam musyawarah desa dan di tetapkan oleh desa setempat untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat desa, dimana meliputi asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi desa. Hal tersebut menjelaskan bahwa KPMD merupakan perwakilan dari kelompok masyarakat desa untuk melakukan pendampingan sesuai dengan pokok masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 menyatakan bahwa kader pemberdayaan masyarakat merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Desa dan Kelurahan. Selanjutnya dalam Pasal 10,

Pelaksanaan peran KPMD yang merupakan tugas serta fungsinya, yaitu sebagai berikut:

1. Pemercepat Perubahan (*enabler*), yaitu membantu masyarakat untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara lebih efektif dan mengembangkan hubungan di antara pemeran (*stakeholders*) pembangunan dengan baik;
2. Perantara (*mediator*), yaitu melakukan mediasi individu atau kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan masyarakat atau kelompok masyarakat dengan *stakeholders* lainnya;
3. Pendidik (*educator*), yaitu secara aktif memberikan berbagai masukan yang positif dan langsung sebagai bagian dari pengalaman-pengalamannya. Membangkitkan kesadaran individu atau kelompok warga masyarakat bahwa ketidakberdayaan mereka disebabkan oleh ketidaksadarannya pada berbagai masalah yang ada pada dirinya;
4. Perencana (*planner*), yaitu mengumpulkan data mengenai masalah yang terdapat dalam masyarakat, kemudian menganalisa dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional untuk menangani masalah dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
5. Advokasi (*advocation*), yaitu advokasi atau mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun pelayanan dan mendorong para pembuat keputusan/Kepala Desa/Lurah untuk mau mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat;
6. Aktivis (*activist*), yaitu melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar dengan tujuan pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok yang kurang mendapatkan keuntungan; dan

7. Pelaksana teknis (*technical roles*), yaitu mengorganisir warga masyarakat, tetapi juga melaksanakan tugas-tugas teknis seperti mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis, mengatur dan mengendalikan keuangan.

KPMD di Desa Sumberkerang memiliki peran tugas serta fungsi yang lebih mendominasi sebagai pendidik, perencana, advokasi dan pelaksana teknis yang di presentasikan dalam 3 (tiga) tahap. Dari beberapa hal diatas, bahwasanya KPMD bersama-sama dan di tanggung jawabkan oleh pihak pendampingan desa yang berkedudukan di Kecamatan, sehingga dari peranan KPMD di Desa Sumberkerang ini mendapatkan beberapa penghargaan yang di raih selama mengemban tugas, yaitu pada Tahun 2016 mendapatkan penghargaan dari Kepala Desa Sumberkerang, “peranan dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat guna mensejahterakan masyarakat miskin” dan penghargaan sebagai “juara 1 kader pemberdayaan masyarakat desa berprestasi” di seluruh Kecamatan Gending pada Tahun 2018. Semua peranan yang di jalankan oleh KPMD mendapatkan dukungan dari berbagai pihak terutama dari pendamping desa yang kedudukannya berada di Kecamatan, karena pada dasarnya apa yang dijalankan KPMD untuk kesejahteraan desa khususnya masyarakat desa.

Hal menarik dalam penelitian ini adalah peranan luas KPMD dalam menjalankan tugas serta fungsinya di Desa Sumberkerang, mulai dari sebagai pendidik, perencana, advokasi dan pelaksana teknis. Dimana, hal tersebut direpresentasikan melalui 3 (tiga) tahap yaitu, (1) berpartisipasi dalam pertemuan musyawarah desa (teknisi fasilitator). (2) memberikan penyuluhan dan mengawasi/pendamping dari kegiatan pelatihan dari program pemberdayaan masyarakat. (3) menjalankan kerjasama dengan usaha ekonomi produktif. Berikut daftar nama pengangkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) pada Masa Bhakti 2016 sampai dengan 2021.

Tabel 1.1 Daftar Pengangkatan KPMD Tahun 2016-2021

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Alamat	Jabatan
1.	Eka Wahyudi, S.Pd.SD.	Probolinggo, 18-05-1987	Dusun Karnin Kulon RT.04 RW.03	KPMD
2.	Mahfudi	Lumajang, 07-08-1981	Dusun Kubat RT.01 RW.06	KPMD
3.	Siti Sulaiha	Probolinggo, 15-10-1976	Dusun Karnin Wetan RT.02 RW.02	KPMD
4.	Putri Siwi Meidar	Probolinggo, 14-05-1989	Dusun Kubat RT.01 RW.06	KPMD
5.	Novita Rahman	Probolinggo, 31-07-1995	Dusun Triwungan RT.03 RW.04	KPMD

Sumber: Peraturan Kepala Desa Sumberkerang Tahun 2016-2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa KPMD berjumlah antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) orang kader. KPMD di Desa Sumberkerang terdapat 5 (lima) orang yang dibentuk karena memumpuni dalam membantu Pemerintah Desa dan mendampingi masyarakat sesuai dengan pokok masalah. Pernyataan tersebut bahwa KPMD di desa Sumberkerang memiliki tugas dan fungsi dalam peranannya, sehingga KPMD dapat mem-presentasikan tugasnya dalam bentuk kerjasama dengan pelaku usaha ekonomi produktif dan berproses aktif di program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di berikan oleh pemerintah desa.

Peraturan Pemerintah (RI) Nomor 43 Tahun 2014 dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 128, menyatakan bahwa;

1. Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan;
2. Pendampingan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendampingan profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga;
3. Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat desa diwilayahnya.

Ayat 2 (dua) diatas telah menyatakan bahwa kader pemberdayaan masyarakat desa merupakan pendampingan masyarakat desa secara teknis yang dikhususkan untuk masyarakat desa. Pada umumnya pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, maka pemerintah desa menggalakkan pembangunan desa agar dapat merealisasikan Dana Desa yang dibantu oleh pendamping desa serta kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dalam melakukan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat. Secara sempit KPMD bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat mengingat KPMD merupakan pendampingan masyarakat desa, dimana pada dasarnya pemberdayaan masyarakat dikhususkan untuk masyarakat desa. Berikutnya peran KPMD dalam tugas serta fungsi, di Desa Sumberkerang yaitu :

1. Sebagai Perencana yaitu, KPMD bersama-sama dengan masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa, dimana KPMD ini sebagai pemberi fasilitasi. Di maksudkan dalam pemberi fasilitasi yaitu memberikan aspirasi-aspirasi baru yang di dapat dari masyarakat desa. Selanjutnya, KPMD juga memberikan inisiatif bekerjasama atau membantu pelaku usaha ekonomi produktif.
2. Sebagai pendidik yaitu, KPMD bersama dengan Pemerintah Desa dan pihak yang bersangkutan lainnya mengadakan atau memberikan

penyuluhan kepada masyarakat. Dimana KPMD memberikan masukan serta memotivasi masyarakat yang kurang mampu agar memproduktifkan diri sendiri dengan berwirausaha. KPMD juga menggerakkan masyarakat desa berpartisipasi langsung dalam pembangunan desa, khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat.

3. Advokasi, di mana KPMD mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun pelayanan serta mendorong Kepala Desa dan pihak yang bersangkutan mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat, biasanya hal ini terdapat dalam forum musyawarah desa.
4. Pelaksana teknis, di mana KPMD melaksanakan tugas-tugas teknis dalam mengendalikan keuangan, karena KPMD juga terlibat dalam pelaksanaan program kegiatan pelatihan.

Selanjutnya, Observasi awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 12 Desember 2018, Ketua KPMD Bapak Eka Wahyudi menyatakan bahwa program/kegiatan pelatihan yang diberikan pemerintah desa bagi masyarakat desa adalah untuk memfasilitasi masyarakat dengan kegiatan pelatihan, agar masyarakat yang kurang produktif mengasah keterampilan serta lebih mandiri. Berikutnya KPMD memunculkan inisiatif menjalankan kerjasama dengan usaha ekonomi produktif untuk memperluas usaha yang dimiliki dengan ikut memasarkan keluar desa maupun daerah, serta memberikan inovasi-inovasi baru bagi para usaha ekonomi produktif. Selanjutnya, di Desa Sumberkerang terdapat dua usaha, yaitu usaha yang bergerak di bidang pertanian (bawang goreng) dan usaha yang bergerak di bidang makanan (kuliner).

Seperti yang telah dijelaskan bahwa KPMD terlibat dalam forum musyawarah desa, dimana seluruh proses musyawarah pembangunan desa menghasilkan dokumen-dokumen yang salah satunya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APB Desa) dengan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Rencana kerja pemerintah desa, selanjutnya disingkat RKPDesa memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun, yaitu penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa, selanjutnya di singkat RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

APBDesa menjamin kepastian rencana kegiatan, yaitu mengikat pemerintah desa dan semua pihak yang terkait untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pemberdayaan masyarakat perlu dukungan dari peran pengelola pembangunan yang berpartisipasi, salah satunya dari peran KPMD yang selaku penggerak masyarakat untuk berperan aktif dalam musyawarah desa serta kegiatan dari program pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2017 lalu, terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan, dimana Pemerintah Desa telat memberikan dana anggaran sehingga pelatihan yang dilaksanakan mengalami keterlambatan. Hal tersebut KPMD terlibat dan melaporkan langsung Kepala Desa, agar dana yang seharusnya dianggarkan segera diberikan. KPMD juga aktif membantu pemerintah desa dalam program pembangunan desa khususnya bidang pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya telah direncanakan melalui musyawarah desa, mengingat KPMD adalah penyambung suara masyarakat dalam musyawarah desa. Semua proses yang dilakukan KPMD menimbulkan perubahan dalam penurunan masyarakat miskin, mengingat KPMD mengajak kelompok masyarakat desa menciptakan usaha kecil, seperti warung, membuka toko kecil, dan membuka jasa. Berikut tabel data penduduk miskin mulai tahun 2015-2018.

Tabel 1.2 Data Penduduk Miskin Desa Sumberkerang Mulai Tahun 2015-2018

2015	2016	2017	2018
801	759	532	422

Sumber: Dokumen RPJMD Desa Sumberkerang Tahun 2016-2021 (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2015 KPMD mengadakan penyuluhan untuk masyarakat desa yang kurang sejahtera (miskin), dari proses KPMD memberikan motivasi sehingga menggerakkan masyarakat berpartisipasi dari kegiatan pembangunan desa, khususnya pada bidang pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Desa memberikan berbagai program pemberdayaan, namun dalam kegiatannya KPMD memberikan usulan berbagai pelatihan untuk masyarakat yang kurang produktif. Sehingga bisa dilihat setiap tahun penduduk miskin di Desa Sumberkerang mengalami penurunan, karena dari dampak pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah desa khususnya KPMD, terdapat hasil positif dari masyarakat desa. Artinya masyarakat desa memiliki kegiatan tersendiri di kesehariannya seperti membuka usaha kecil maupun jasa.

Prioritas program pemberdayaan masyarakat tahun 2017 yaitu program fasilitasi-fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat dan difabel (karang werda), dimana terdapat pada kegiatan pelatihan menjahit dan membuat kue, sedangkan pada tahun 2018 peningkatan kapasitas masyarakat kelompok perempuan, hal tersebut terdapat kegiatan pelatihan membuat dan pelatihan bawang goreng. Di maksudkan kedua program tersebut, Pemerintah Desa memberikan program di bidang pemberdayaan masyarakat, dan di bantu oleh KPMD dalam memberikan kegiatan berupa pelatihan untuk kelompok masyarakat yang kurang produktif dari kelompok masyarakat, pemuda, dan masyarakat lainnya, Surat keputusan Desa Sumberkerang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Masa bhakti 2016 sampai 2021 yaitu memutuskan;

1. keputusan Kepala Desa Sumberkerang tentang pengangkatan kader pemberdayaan masyarakat desa masa bhakti 2016 sampai dengan 2021;
2. mengangkat yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai kader pemberdayaan masyarakat desa masa bhakti 2016 sampai dengan 2021;

3. kader pemberdayaan masyarakat desa masa bhakti 2016 sampai dengan 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua melaksanakan tugas dan memperoleh hak sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
4. segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan.

Surat keputusan desa Sumberkerang di atas menjelaskan bahwa KPMD merupakan bagian dari pemerintahan desa yang dibentuk guna membantu proses pemerintahan khususnya bagi masyarakat desa. Selanjutnya dilihat pada nomer 4 (empat) di jelaskan bahwa biaya yang ditimbulkan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal tersebut telah jelas bahwa KPMD juga ikut andil dalam APBDes yang mengacu pada RKPDes karena KPMD memiliki peran sebagai pemberi fasilitasi, yaitu memberikan usulan kegiatan program dalam musyawarah desa serta pemberi inovasi dalam permasalahan desa khususnya bagi masyarakat yang kurang terampil melalui musyawarah pembangunan Desa, sumber: <http://kawasan.bappenas.go.id/images/data/Produk/PanduanMusrenbang/MusrenbangDesa.pdf> (diakses pada 2 februari 2019 pukul 20:25 WIB).

Berdasarkan hal diatas, bahwa peran KPMD penting bagi desa khususnya membantu Pemerintah Desa dalam program/kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, serta bersama-sama dengan masyarakat berpartisipasi dalam musyawarah desa. Kemudian KPMD juga melakukan kerjasama dengan membantu usaha ekonomi produktif, ikut serta memasarkan hasil usaha agar lebih dikenal masyarakat luas. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probonggo Tahun 2017/2018”**.

1.2 Perumusan Masalah.

Bandur (2016:53) dalam bukunya mengatakan bahwa rumusan masalah (*reseach Question*) merupakan salah satu tahap yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. pada tahap ini, seorang peneliti mempersempit masalah penelitian dengan menyediakan dua atau lebih pertanyaan penelitian yang hendak ditemukan dalam penelitian. Secara khusus, Creswell (2005:9) dalam Bandur (2016:53) menjelaskan bahwa rumusan masalah penelitian atau dalam bahas inggris disebut *reseach questions* merupakan bentuk yang lebih spesifik dari tujuan penelitian. Maka dari itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimana Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo Tahun 2017/2018”**.

1.3 Tujuan Penelitian.

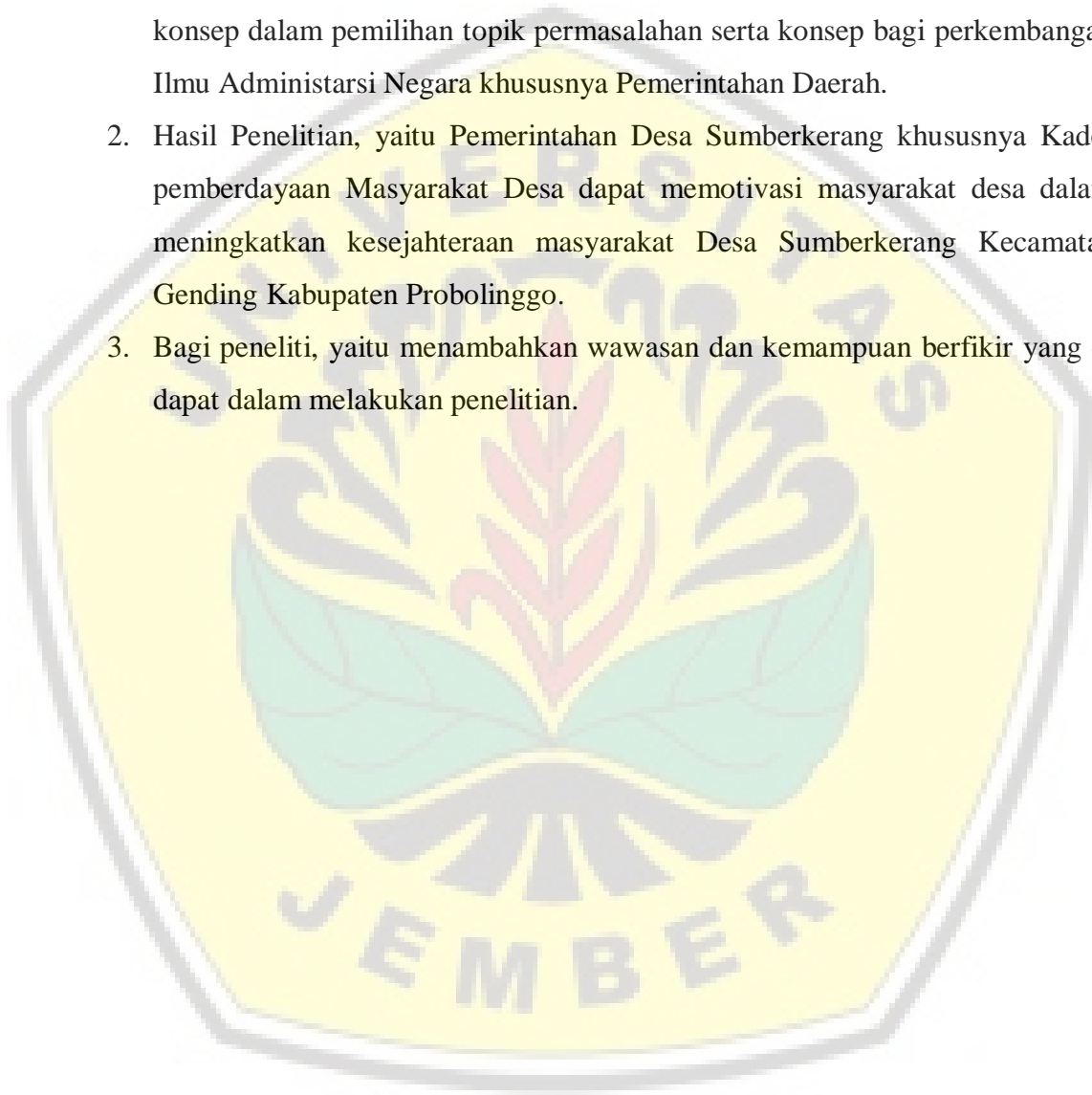
Menurut Creswell (2005); Creswell & Clark (2007) dalam Bandur (2016:52) rumusan tujuan dalam penelitian kualitatif mengindikasikan tujuan untuk mengeksplorasi, memahami, dan menjelaskan gejala utama individu-individu yang hendak diteliti pada setting penelitian tertentu sekaligus untuk memecahkan masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan definisi tujuan penelitian diatas, peneliti dapat merumuskan tujuan penelitian sesuai dengan yang telah dijelaskan diatas. Maka rumusan dari tujuan penelitian ini adalah: **“Mendeskripsikan Tentang Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo tahun 2017/2018”**.

1.4 Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian dalam Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:21) menyatakan manfaat penelitian disebut juga signifikan penelitian. manfaat memaparkan kegunaan hasil yang akan dicapai, baik untuk kepentingan

ilmu, kebijakan pemerintah, maupun masyarakat luas, maka manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Akademis Penelitian, yaitu sebagai bahan referensi yang berkontribusi berupa konsep dalam pemilihan topik permasalahan serta konsep bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya Pemerintahan Daerah.
2. Hasil Penelitian, yaitu Pemerintahan Desa Sumberkerang khususnya Kader pemberdayaan Masyarakat Desa dapat memotivasi masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo.
3. Bagi peneliti, yaitu menambahkan wawasan dan kemampuan berfikir yang di dapat dalam melakukan penelitian.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar.

Konsep dasar merupakan awal bagi peneliti agar dapat merumuskan sejumlah konsep dasar secara teoritis yang nantinya akan diperlukan untuk pembuatan kerangka berpikir dalam melakukan penelitian. Menurut Glasser & Strauss (1967); Strauss & Corbin (1994) dalam Bandur (2015:87-88) menyatakan desain penelitian ‘teori dari bawah’ (*grounded theory*) merupakan suatu prosedur penelitian yang berfokus pada pembuatan konsep (konseptualisasi) berdasarkan data. Para penemu metode ini menjelaskan bahwa penekanan tujuan *grounded theory* ialah pada penemuan teori-teori baru berdasarkan data yang dikumpulkan. Desain penelitian *grounded theory* juga dapat digunakan ketika peneliti hendak menganalisis suatu proses dan membutuhkan suatu teori atau penjelasan yang luas terhadap suatu proses, maka adapun teori atau konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Kelembagaan Pemerintahan Desa.
2. Konsep Peran
3. Konsep Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
4. Konsep Pemberdayaan Masyarakat.

2.1.1 Kelembagaan Pemerintahan Desa.

Rasyid (1996:37-38) dalam Yabbar dan Hamzah (2015) menyatakan tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah termasuk pemerintah desa adalah pemberian pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) serta pembangunan (*development*) yang seluruhnya diabdikan bagi kepentingan masyarakat. Menuju desa mandiri dan sejahtera perlu adanya kepemimpinan serta pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu perangkat desa dalam menjalankan

pemerintahan desa. Untuk desa mandiri bukan berarti tidak membutuhkan hubungan dan kerja sama dengan desa lain atau pihak ketiga, bahkan desa membutuhkan kerja sama dengan semua pihak dalam pengembangan desanya. Berikut unsur dalam kelembagaan desa, diantaranya:

2.1.1.1 Pemerintahan Desa.

Menurut Yabbar dan Hamzah (2015) dalam bukunya menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa, penyelenggaraan pemerintahan desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan organisasi, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan, dan pengembangannya.

Berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas-asas, yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, serta partisipatif.

2.1.1.2 Pemerintah Desa

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Saparin (2009:19) dalam Yabbar dan Hamzah (2009) menyatakan bahwa pemerintah desa merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang Kepala

Desa beserta para pembantunya (perangkat desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa berdasarkan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sistem dari Pemerintah desa sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berikut unsur-unsur pemerintah desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa yaitu.

1. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan kepala pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. kepala Desa mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

2. Perangkat Desa

Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Perangkat Desa terdiri atas:

a. Sekertaris Desa

Merupakan staf yang membantu kepala Desa, yang berarti sekretaris Desa adalah orang kedua setelah kepala desa. sekretaris desa bertugas pada bidang administrasi dan pelayanan umum.

b. Pelaksanaan Kewilayahan (Kepala Dusun)

Merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Adapun fungsi dan tugasnya melaksanakan pemerintahan di wilayah kerjanya serta melaksanakan kebijakan dan keputusan kepala Desa

c. Pelaksana Teknis (Kepala Urusan)

Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas tiga seksi, kepala seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya. Ketentuan mengenai bidang urusan tersebut diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam Negeri.

3. Badan Permusyawaratan Desa

Badan permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

4. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Konteks mendukung pembangunan Desa, selain Pemerintahan Desa dan BPD juga dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat Sumber: [https:// www.daunpendidikan.com /2018/03/unsur-unsur-pemerintahan-desa-yang.html](https://www.daunpendidikan.com/2018/03/unsur-unsur-pemerintahan-desa-yang.html) (diakses pada 3 maret 2019 pukul 23.22 WIB).

2.1.2 Konsep Peran.

Kahn (1964) yang dikutip oleh Lidya Agustina, teori peran (*role Model*) merupakan penekanan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai posisi yang ditempati di masyarakat. Dengan demikian teori peran tidak lepas dari definisi peran dan berbagai istilah perilaku di dalamnya. Peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan serta tanggung jawab yang menyertainya. Berikutnya, David Berry dalam Wirutomo (1981: 99-101) yang dikutip oleh Mutiawanthi (2017) menyatakan bahwa peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang di harapkan menjalankan

kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu, ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat.

Alfi Syahri (2018) menyatakan bahwa ditinjau dari perilaku organisasi, peran ini merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi. Secara umum 'peran' dapat di definisikan sebagai "*expectations about appropriate behaviour in a job position (leader, subordinator)*". Ada dua jenis perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan, yaitu (1) *role perception*: yaitu persepsi seseorang mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku: atau dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut. (2) *role expectation*: yaitu cara orang lain menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Dengan peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi akan terbentuk suatu komponen penting.

Mutiawanthi (2017:107) menyatakan bahwa peran merupakan atas harapan-harapan yang melekat pada ciri-ciri perilaku tertentu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang yang menduduki posisi atau status sosial tertentu dalam masyarakat. Setiap peran memiliki tugas-tugas tertentu yang harus dilaksanakan oleh pengembang peran. Pendapat lain dalam buku Sosiologi suatu pengantar yaitu Menurut Bruce J Cohen (1992:76) yang dikutip oleh Mutiawanthi (2017) menyatakan bahwa peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu. Teori yang mendukung dalam penelitian ini merupakan teori peran yang menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat.

Peran yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya di masyarakat, di mana dalam peranannya memiliki perilaku yang di laksanakan oleh orang atau lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi dalam situasi sosial. Dengan demikian, kaitan teori dengan penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian, dimana penelitian akan melihat sejauh mana peran kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Peranan KPMD memiliki kewajiban dan keharusan yang dilakukan oleh seseorang di mana memiliki kedudukan dalam status serta mengikuti peraturan tertentu, baik nilai moral maupun lainnya.

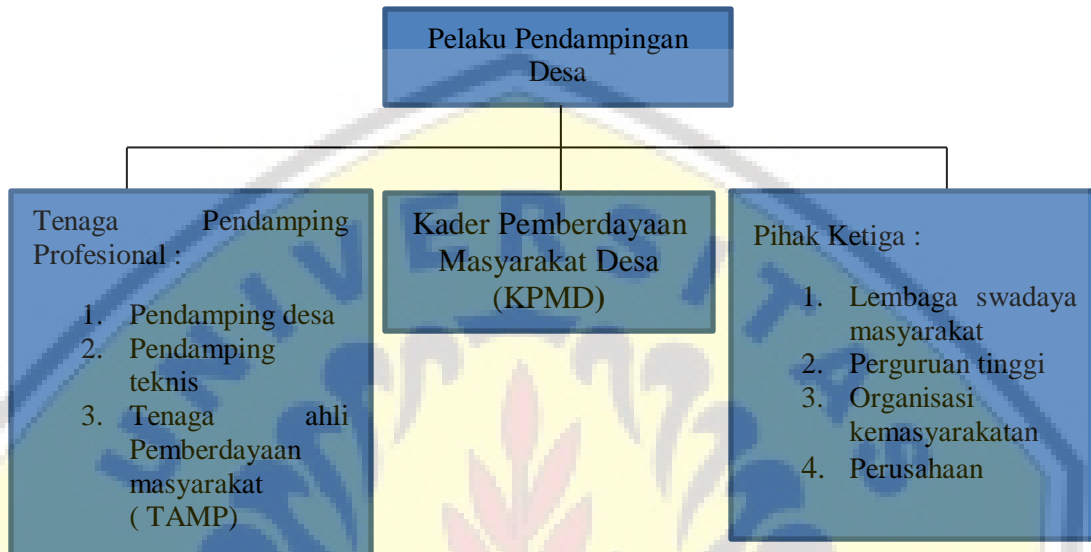
2.1.3 Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Jafar (2015:11) dalam bukunya menyatakan “Kader Desa” adalah orang yang di bantu untuk memegang peran penting dalam mengorganisir dan memimpin rakyat desa bergerak menuju pencapaian cita-cita bersama. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pendampingan masyarakat desa merupakan bekal untuk proses memberdayakan desa. Kader pemberdayaan masyarakat desa merupakan pendampingan masyarakat desa yang ranahnya berada di desa untuk membangun kesadaran kritis masyarakat desa, memperkuat organisasi-organisasi masyarakat, memfasilitasi pembangunan partisipatif serta memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa. Legalitas KPMD tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;

- a) Tenaga pendampingan professional;
- b) Kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD);
- c) Pihak ketiga.

Dengan demikian, KPMD merupakan pendampingan masyarakat desa yang berada dalam suatu (kelompok), di perlukan keberadaan dan peranannya untuk bekerja mendampingi beragam kegiatan di desa secara mandiri. Berikut adalah gambar 2.1

Bagan hubungan kerja antara kader pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan profesional maupun pendampingan pihak ketiga.



Bagan 2.1 Hubungan Kerja Antara KPMD, Pendampingan Professional Maupun Pihak Ketiga (Sumber: Jafar, 2015:13)

Pendampingan masyarakat desa secara teknis dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendampingan profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa (KPMD), dan pihak ketiga. Selain ketentuan dari Permendesa di sebutkan bahwa, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Pasal 3 menyebutkan bahwa, KPMD dipilih dari masyarakat setempat oleh pemerintah desa melalui musyawarah desa untuk di tetapkan dengan keputusan kepala desa. Oleh karena itu, maknanya semakin jelas bahwa KPMD merupakan individu-individu yang di persiapkan sebagai kader yang berperan dalam menggerakkan masyarakat desa. Pendampingan masyarakat desa merupakan peraturan Undang-Undang Desa agar terdapat sistem internal desa guna menjadikan desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Undang-Undang desa menegaskan bahwa KPMD melakukan kegiatan dalam pembangunan desa, terlebih dalam bidang pemberdayaan masyarakat, secara keseluruhan KPMD merupakan *sub-sistem* dari pendampingan yang bergerak di

lingkup skala lokal Desa, berkedudukan di antaranya dari Pusat hingga Camat. Berikut tabel kedudukan pelaku pendampingan

Tabel 2.1 Kedudukan Pelaku Pendampingan

Kedudukan	Pelaku Pendampingan
Pusat	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat
Provinsi	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten/Kota	Pendampingan Teknis
Kecamatan	Pendampingan Desa
Desa	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sumber: Marwan (2015:16)

Berdasarkan tabel diatas bahwasanya kedudukan desa tidak lagi bersifat sub-Nasional, melainkan berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota, desa tidak lagi berada dibawah struktur administratif terbawah apalagi perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah. Desa di landasi asas rekognisi dan subsidiaritas yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul lokal berskala desa. Jafar (2015:17) dalam bukunya menyatakan bahwa fokus adanya pendampingan desa adalah memperkuat proses kaderisasi bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dengan peluang untuk melakukan kaderisasi terhadap komponen masyarakat lainnya. Pendampingan masyarakat desa merupakan bagian utama dari proses pengembangan kapasitas masyarakat desa.

Kader pemberdayaan masyarakat Desa (KPMD) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong. Kader pemberdayaan masyarakat desa adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berpartisipasi. Berdasarkan Pasal 31 Permendesa Nomor 3 Tahun 2015, Pemerintah desa dapat mengadakan KPMD melalui mekanisme musyawarah desa untuk di tetapkan dengan surat keputusan desa. KPMD berperan dan menggali gagasan masyarakat dalam rangka

meningkatkan kesejahteraannya, memfasilitasi dalam pertemuan musyawarah desa, menginformasikan kepada masyarakat hasil keputusan musyawarah. KPMD juga berperan memfasilitasi masyarakat dalam musyawarah desa dengan memberikan masukan dan bimbingan teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, memfasilitasi dan mendorong masyarakat dalam memenuhi apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

Berdasarkan Pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014, pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Pendampingan merupakan salah satu langkah penting yang perlu dilakukan untuk percepatan pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa melalui program dari kegiatan pemberdayaan masyarakat. Peran KPMD dalam pemberdayaan masyarakat merupakan mekanisme yang sangat penting dalam semua kegiatan program pemberdayaan masyarakat. KPMD tidak hanya dituntut mempunyai kemampuan teknis dalam penulisan usulan tetapi juga dituntut dapat merangkul masyarakat ikut berpartisipasi dalam setiap tahapan kegiatan program pemberdayaan masyarakat.

2.1.3 Konsep Pemberdayaan Masyarakat.

Pengertian pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata “*empowerment*” yaitu supaya untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Wahyono, *et al.* (2001:8) dalam Surjono dan Trilaksono (2008) menyatakan bahwa pendekatan pemberdayaan dengan menekankan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisasikan diri mereka sendiri. Selanjutnya Nugroho Dan Surjono (2008) dalam Surjono dan Trilaksono (2008) Pendekatan pemberdayaan masyarakat seperti ini diharapkan

memberikan peranan kepada individu bukan objek tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan hidup mereka. Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2014, bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Yabbar dan Hamzah (2015) dalam bukunya menyatakan upaya mengoptimalkan tujuan merealisasikan makna pemberdayaan masyarakat, maka dibutuhkan sebuah prinsip-prinsip sebagai sebuah pegangan atau petunjuk arah kemana tujuan itu akan di jalankan, dalam kerangka mengoptimalkan proses-proses penguatan dan pemberdayaan terhadap masyarakat agar dapat mandiri, sejahtera, dan partisipatoris. Prinsip dasar pemberdayaan masyarakat ialah Penyadaran, Pendidikan dan Pelatihan, Penguatan jaringan, Pengembangan kekuatan, Penguatan modal sosial, Penguatan kapasitas serta Pengakuan. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:

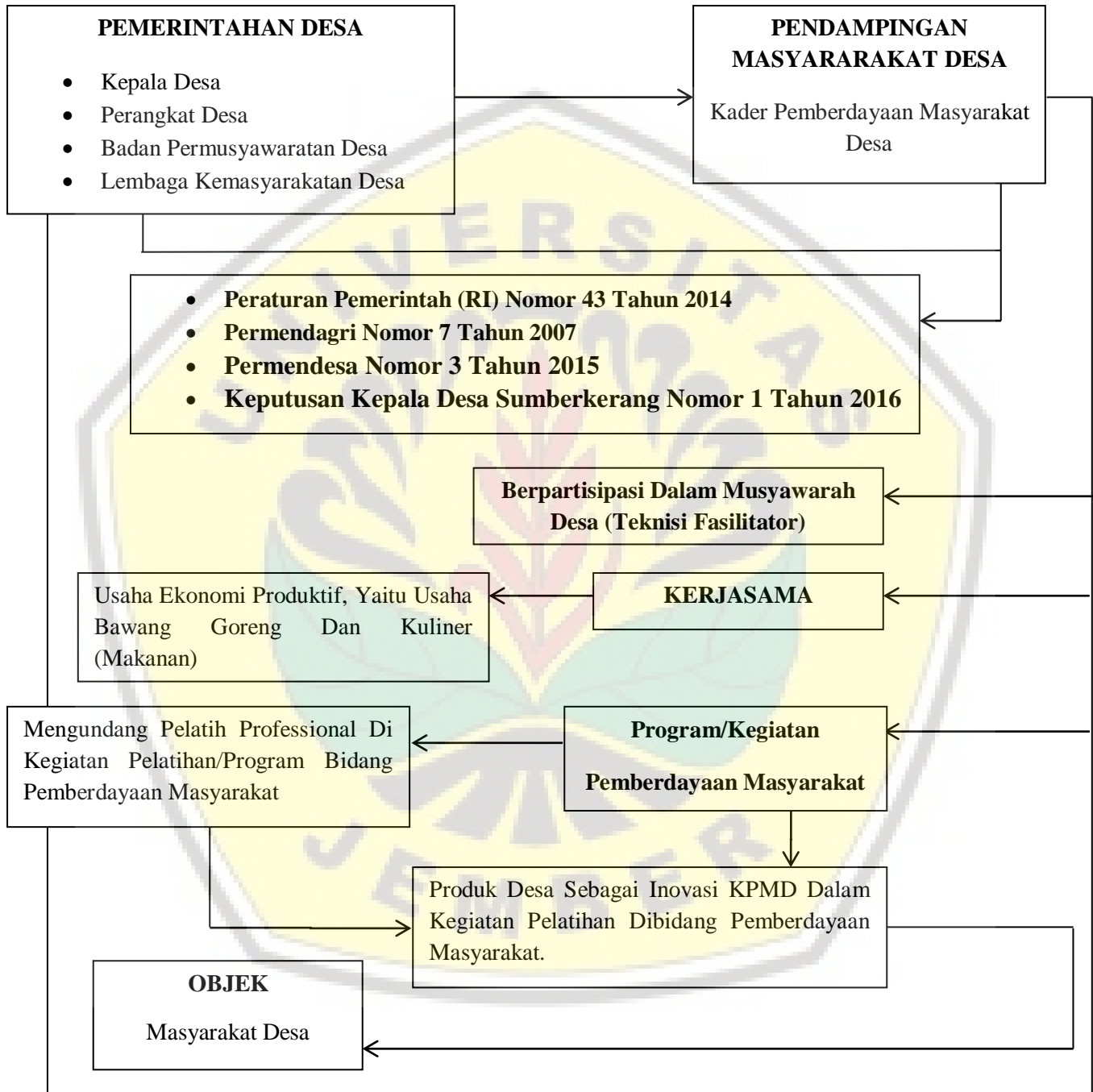
1. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa.
2. Meningkatkan kualitas Pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
3. Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.

Munawar. N (2011: 88) menyatakan, bahwa pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai strategi *alternative* dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literature dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya. Pembangunan dan pemberdayaan merupakan hal

banyak dibicarakan masyarakat terkait dengan kemajuan dan perubahan apalagi jika dikaitkan dengan *skill* masyarakat yang masih kurang akan menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Hal tersebut adanya tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki. Kerangka Pemikiran.

Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dilakukan di perkotaan dan pedesaan namun dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah pemberdayaan di pedesaan yang dilaksanakan oleh pendampingan masyarakat desa, yaitu kader pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat lokal desa dilaksanakan dengan adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan, pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Pemberdayaan menjadi cukup kuat dengan adanya partisipasi masyarakat desa dengan memperoleh ketrampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri melalui berbagai poses. Usaha memberdayakan masyarakat desa dalam mensejahterkan masyarakat yang semakin kompleks dalam perkembangannya tidak semata-mata terbatas pada peningkatan produksi produk desa seperti pertanian melainkan dari masyarakat desa sendiri sebagaimana diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan.

2.2 Kerangka Pemikiran.



BAB 3. METODE PENELITIAN

Husaini & Purnomo (1995:42) dalam bukunya menyatakan bahwa metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistemologi penelitian, yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian. Selanjutnya menurut Creswell & Clark (2007:4) dalam Bandur (2016:13) menyatakan bahwa metodologi penelitian berkaitan dengan kerangka filosofi dan teoretis yang kompleks dan luas untuk dijadikan panduan, pedoman, arahan, dan bahkan dorongan yang mendasari sebuah penelitian ilmiah. Berdasarkan definisi tersebut maka, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Pendekatan penelitian
2. Tempat dan waktu penelitian
3. Situasi sosial
4. Desain penelitian
5. Teknik pengumpulan data
6. Teknik keabsahan data
7. Teknik analisis data

3.1 Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Menurut Creswell (2009) dalam Bandur (2016:18) penelitian kualitatif ialah pada tujuan eksplorasi dan pemahaman data secara mendalam. Data dalam konteks ini berkaitan dengan makna setiap ungkapan mengenai masalah penelitian yang disampaikan secara langsung oleh informan, terutama informan-informan utama

atau kunci penelitian (*key informants*). Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian natularistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Menurut Sugiyono (2007:8) dalam bukunya menyatakan bahwa penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrument, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkontruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Berpendapat bahwa penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.

Menurut Husaini & Purnomo (2009:41) dalam bukunya menyatakan bahwa pada bagian ini dipaparkan dimana penelitian tersebut dilaksanakan dan kapan penelitian dimulai serta berakhir. Tempat dan waktu penelitian bermanfaat untuk membatasi daerah dan waktu dari variabel-variabel yang diteliti. Lokasi merupakan tempat dalam penelitian dimana dapat menangkap suatu keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Adapun lokasi penelitian adalah di Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2017/2018.

3.3 Situasi Sosial.

Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2016:52) situasi sosial terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara strategis. Informan

kunci atau subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi, menguasai, memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Berdasarkan pengertian diatas, elemen situasi sosial dalam penelitian adalah sebagai berikut.

1. Tempat (*place*), yaitu di Desa Sumberkerang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo.
2. Pelaku (*aktors*), yaitu orang-orang yang terlibat dan berperan penting dalam kegiatan Pemerintahan Desa, KPMD serta pelaku program Pemberdayaan Masyarakat, yaitu Masyarakat Desa Sumberkerang.
3. Aktifitas (*activity*), yaitu meliputi:
 1. Pemerintah Desa (yang meliputi didalamnya) dan KPMD merencanakan kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa;
 2. KPMD bekerjasama dengan pelaku Usaha Ekonomi Produktif;
 3. Pemerintah Desa dan KPMD memberikan pelatihan kepada masyarakat desa yang bersangkutan dan
 4. Pemerintah Desa dan KPMD memberikan penyuluhan untuk memotivasi masyarakat desa dan mengajak masyarakat desa berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, program pemberdayaan masyarakat.

3.4 Desain Penelitian.

Nazir (2014:70) dalam bukunya menyatakan desain dari penelitian adalah semua proses yang di perlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian yang lebih sempit desain penelitian hanya mengenai pengumpulan dan analisis data saja. Desain penelitian tidak pernah dilihat sebagai ilmiah atau tidak ilmiah, tetapi dilihat dari segi baik atau tidak baik. Berikut menurut Bandur (2016:87) dalam bukunya menyatakan bahwa

desain-desain penelitian kualitatif dapat mencakup desain teori dari bawah (*grounded theory*), etnografi, naratif, biografi, dan fenomenologi. Desain-desain tersebut ditentukan peneliti berdasarkan pandangan metodologis yang diyakini peneliti sendiri serta signifikansi masalah penelitian yang diteliti baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun perbaikan kebijakan dan praktik-praktik yang ada. Berdasarkan definisi di atas, maka desain penelitian tersebut ialah sebagai berikut.

3.4.1 Fokus Penelitian.

Menurut Moleong (2004:237) Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan, pertama penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi layak. Kedua, penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-eksklusi untuk menyaring informasi yang mengalir masuk. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah peran kader pemberdayaan masyarakat desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo.

3.4.2 Data dan Sumber Data.

Sujarweni (2014:89) dalam bukunya menyatakan bahwa dalam penelitian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi, baik yang digunakan untuk bahan penelitian maupun yang diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian kualitatif, data yang digunakan yaitu berupa lisan, tulisan, dan aktivitas yang dilakukan orang-orang yang diteliti. Sedangkan menurut Moleong (2013:157) dalam bukunya menyatakan bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif secara umum dibagi menjadi dua, yaitu sumber data utama dan sumber data

tambahan. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data, meliputi:

1. Sumber Data Utama.

Lofland dan Lofland dalam Moleong (2013:157) menyatakan bahwa sumber data utama penelitian kualitatif, meliputi: kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati, maupun diwawancarai. Jadi, data utama yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh peneliti melalui observasi (pengamatan) dan wawancara mendalam dengan informan yang memiliki pemahaman terkait objek penelitian ini, yaitu peran kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo.

1. Sumber data tambahan.

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2013:157) sumber data tambahan meliputi: sumber-sumber tertulis (buku-buku referensi, arsip, dan dokumen resmi), foto, serta data statistik. Jadi, sumber data tambahan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber-sumber data tertulis, baik melalui media cetak maupun *online*, berupa buku-buku referensi, dokumen, arsip, dan data lainnya sebagai penunjang dalam penelitian ini.

3.4.3 Informan Penelitian.

Moleong (2013:9) dalam bukunya menyatakan salah satu karakteristik penelitian kualitatif, yaitu memposisikan manusia sebagai alat (instrument), dimana peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Selanjutnya Afrizal (2014:139) dalam bukunya mendefinisikan informan penelitian

sebagai orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain tentang suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti/pewawancara mendalam. Lebih lanjut, Afrizal (2014:139) mengategorikan informan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Informan Pengamat, yaitu informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu hal kepada peneliti. Dengan kata lain, informan kategori ini merupakan orang lain yang mengetahui orang/pelaku kejadian yang di teliti oleh peneliti;
2. Informan pelaku, yaitu informasi yang memberikan keterangan tentang dirinya, perbuatannya, interprestasinya dan pengetahuannya.

Berikut adalah daftar informan dalam penelitian ini.

Tabel 3.1 Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Bapak Abdullah Hidayat	Kepala Desa
2.	Ibu Sudartik	Anggota Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Probolinggo
3.	Bapak Bambang	Pendamping Desa
4.	Bapak Eka Wahyudi	Ketua KPMD
5.	Ibu Putri	Anggota KPMD
6.	Ibu Sulis	Kaur Perencanaan
7.	Bapak Busahe	Kaur Keuangan
8.	Bapak Sarito	Usaha Bawang Goreng
9.	Ibu Novi	Usaha Bidang Kuliner
10.	Ibu Ardian	Pelatih Menjahit Dan Mambatik
11.	Ibu Sri	Pelatih Membuat Kue Dan Bawang Goreng
12.	Ibu Nanik	Ketua Ibu PKK
13.	Ibu Lisa	Anggota Ibu PKK
14.	Ibu Fatimah	Kelompok Pelatihan Bawang Goreng
15.	Ibu Sholiha	Kelompok Pelatihan Menjahit
16.	Ibu Nurul Faizatul J.	Kelompok Pelatihan Membuat Kue
17.	Ibu Nafiatul Ulya	Kelompok Pelatihan Mambatik

Sumber Informan: informan ditentukan peneliti berdasarkan keterkaitan dengan peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

3.5 Teknik Pengumpulan Data.

Afrizal (2014:20) dalam bukunya menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data yang memungkinkan untuk mendapatkan data berupa kata-kata dan perbuatan manusia. Lebih lanjut, Sugiyono(2008: 224) dalam bukunya menyatakan bahwa, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

3.5.1 Observasi.

Menurut Sujarweni (2014:23) dalam bukunya menyatakan observasi merupakan kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran *riil* suatu peristiwa/kejadian terkait dengan pertanyaan penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu). Selanjutnya, Menurut Nasution (1998) dalam Sugiyono (2007:226) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang di peroleh melalui observasi. Observasi yang peneliti lakukan memiliki tujuan untuk studi pendahuluan dengan mengamati peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

3.5.2 Wawancara.

Menurut Sujarweni (2014:31) dalam bukunya menyatakan, yaitu kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam terkait isu dan tema yang diangkat dalam penelitian melalui proses tanya jawab. Selanjutnya Afrizal (2014:21) dalam bukunya menyatakan bahwa penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam, di mana peneliti melakukan wawancara

berdasarkan pertanyaan yang umum, kemudian didetailkan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara atau setelah melakukan wawancara untuk melakukan wawancara berikutnya.

3.5.3 Dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2007:240) dalam bukunya menyatakan bahwa, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), kriteria, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Dokumentasi merupakan pelengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Lebih lanjut, dokumentasi yang dituangkan dalam penelitian ini, yaitu dokumen yang berbentuk tulisan.

3.6 Teknik Keabsahan Data.

Moleong (2013:321) dalam bukunya menyatakan bahwa keabsahan data merupakan konsep penting yang dipengaruhi dari konsep validitasi dan reliabilitas untuk meningkatkan derajat kepercayaan data, sehingga hasil penelitiannya benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari segala segi. Pemeriksaan keabsahan data terdiri dari 4 (empat) kriteria dan 10 (sepuluh) teknik sebagaimana Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Iktisar dan Kriteria Keabsahan Data

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas (derajat kepercayaan)	1. perpanjangan keikut-sertaan 2. ketekunan pengamat 3. triangulasi 4. pengecekan sejawat 5. kecukupan referensial 6. kajian kasus negatif 7. pengecekan anggota
Kepastian	8. uraian rinci
Kebergantungan	9. audit kebergantungan
Kepastian	10. audit kepastian

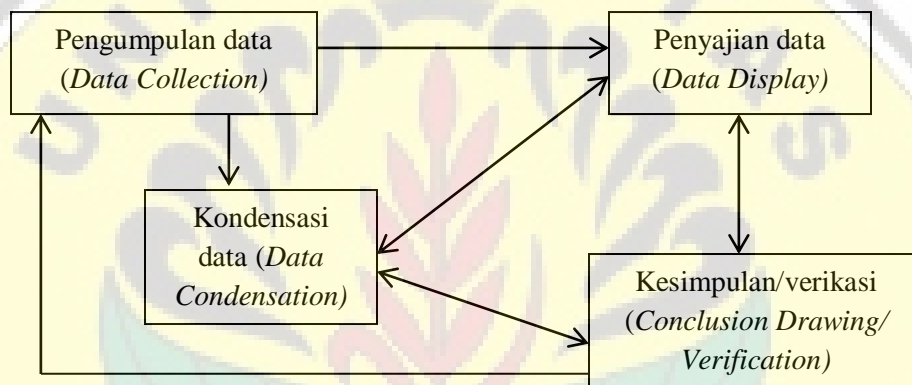
Sumber: Moleong (2004:174)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data. Moleong (2013:330) dalam bukunya menyatakan bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Lebih lanjut, Afrizal (2014:168) dalam bukunya berpendapat bahwa triangulasi dilakukan untuk memperkuat data, sehingga peneliti yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Menurut Bachri (2010) dalam Firdaus & Zamzam (2018:110), triangulasi sumber yaitu membandingkan kembali tingkat kesahihan data dan informasi yang telah diambil dari berbagai sumber yang berbeda, dengan cara membandingkan antara hasil wawancara dengan observasi, antara informasi yang di sampaikan, di hadapan umum dengan yang di sampaikan secara pribadi, dan membandingkan antara hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

3.7 Teknik Analisis Data.

Mudjirahardjo dalam Sujarweni (2014:34) menyatakan bahwa analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya

sehingga diperlukan suatu temuan berdasarkan focus atau masalah yang ingin dijawab. Kegiatan analisis data kualitatif menurut Miles & Faisal dalam Sujarweni (2014:34), analisis data dilakukan selama pengumpulan data dilapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif. Analisis data dapat dilakukan melalui berbagai teknik, salah satunya yaitu teknik analisis data model Miles & Huberman (2014:14) sebagaimana yang digunakan dalam penelitian ini, dengan alur tahapan sebagai berikut.



Bagan 3.1 Analisis data model Miles & Huberman (Sumber: Miles, Huberman dan Saldana, 2014:14)

1. Pengumpulan Data (*data collection*)

Tahap pertama dalam teknik penyajian data yaitu pengumpulan data. Data dikumpulkan dari berbagai macam sumber baik yang di peroleh dari media cetak (buku, dokumen, hasil wawancara, dsb) maupun media *online*.

2. Kondensasi Data (*data condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data yang diperoleh dari transkrip wawancara di lapangan yang merupakan catatan tertulis, dan dokumen-dokumen. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Miles, Huberman dan Saldana bahwa *Data Condensation refers to the process of selecting, focusing, simplifying, abstracting, and/or transforming the data that*

appear in the full corpus (body) of written-up field-notes interview transcripts, and documents. Berdasarkan pernyataan tersebut, kondensasi data dapat memperkuat data yang diperoleh. Kondensasi data dapat disajikan dengan berbagai tahap diantaranya: *Selecting, Focusing, Abstracting, Simplifying/transforming.*

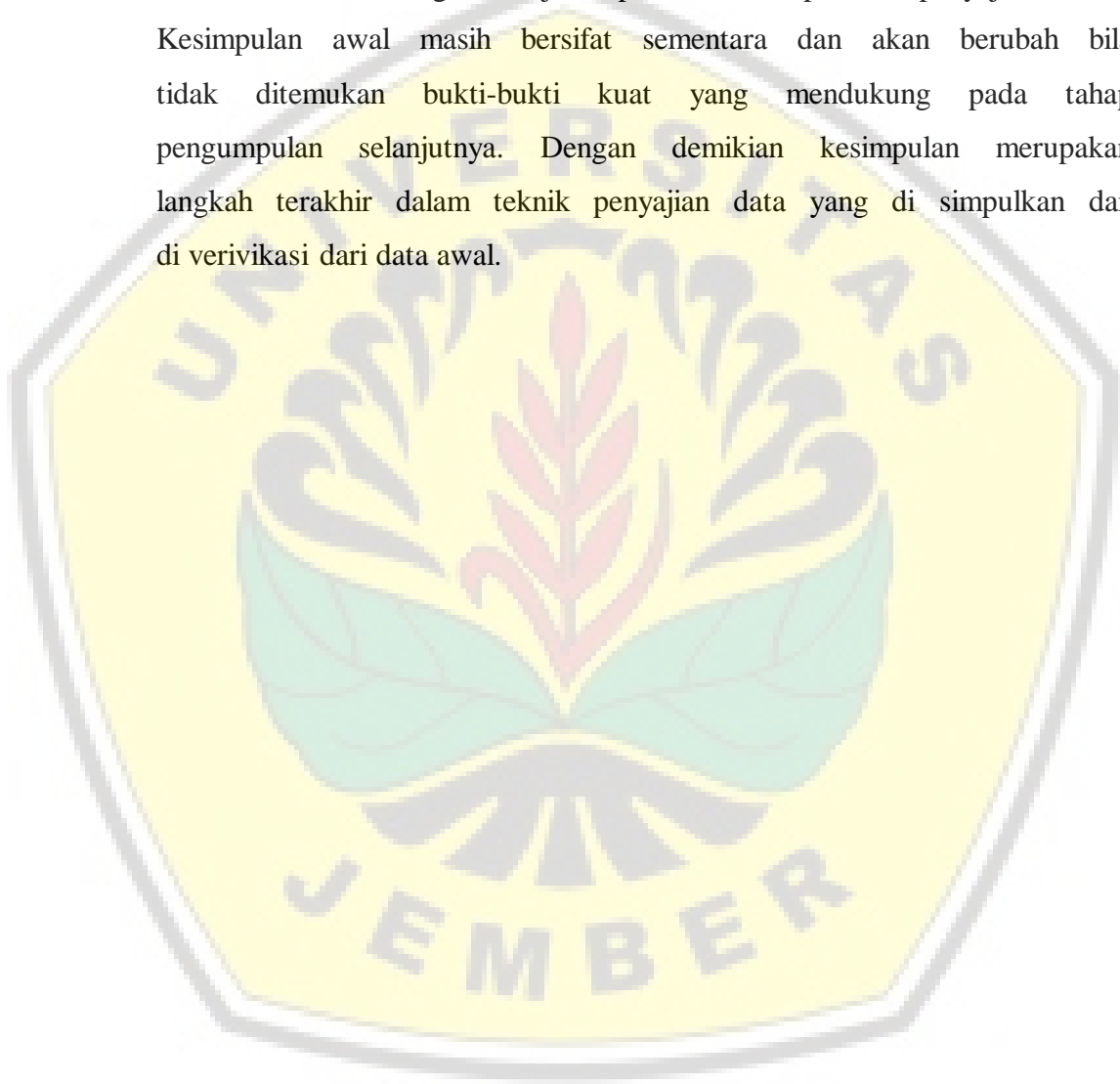
- a. *Selecting*, peneliti harus bertindak selektif yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, infomasinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisi (Miles dan Huberman, 2014:18).
- b. *Focusing*, tahap ini merupakan tahap lanjutan dari tahap pertama. Setelah data di seleksi kemudian pada tahap berikutnya memfokuskan data, agar data yang diperoleh lebih focus dan tidak meluas secara umum. Peneliti memfokuskan dat yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. pada tahap ini peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan rumusan masalah.
- c. *Abstracting*, yaitu pembuatan rangkuman yang hanya meilih inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga tetap berada didalamnya.
- d. *Simplifying dan Transforming*, yaitu tahap berikutnya menyederhanakan dan mentranformasikan data dalam berbagai cara, yakni melalui proses selektif data, ringkasan dan uraian singkat.

3. Penyajian data (*data display*)

Setelah kondensasi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, *flowchart*, dan sejenisnya. Peneliti menggunakan penyajian data berupa uraian singkat, bagan dan tabel. Penyajian data dengan tabel, bagan, dan uraian singkat ini mempermudah peneliti dalam menyajikannya.

4. Kesimpulan/verifikasi (*conclusion/verification*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi data yang telah disajikan dalam suatu bentuk sebagai wujud pelaksanaan proses penyajian data. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan selanjutnya. Dengan demikian kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam teknik penyajian data yang di simpulkan dan di verivikasi dari data awal.



BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang mengumpulkan data melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara tentang peran kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dalam pemberdayaan masyarakat desa, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) merupakan pendampingan masyarakat desa yang dikhususkan untuk masyarakat desa. Peran KPMD dalam tugas serta fungsinya, yaitu sebagai perencana, pendidik, advokasi, dan pelaksana teknis. Namun, presentasinya KPMD terdapat 3 (tiga) tahap dalam pembangunan desa khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat desa.
2. Peranan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dalam tahap pembangunan desa, khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat desa, yaitu sebagai berikut :
 - a. Berpartisipasi aktif forum musyawarah desa, sebagai teknis fasilitator dengan cara menggali gagasan serta aspirasi masyarakat desa.
 - b. memberikan penyuluhan bagi masyarakat desa yang kurang produktif, dengan cara memotivasi dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan, serta mengawasi/pendamping dari kegiatan pelatihan di bidang pemberdayaan masyarakat desa.
 - c. Menjalankan kerjasama dengan usaha ekonomi produktif.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan, KPMD bekerjasama dengan Ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan pihak-pihak yang bersangkutan lainnya.
4. Program/kegiatan pelatihan dari bidang pemberdayaan masyarakat desa. Mayoritas kelompok masyarakat yang mengikuti pelatihan tersebut.

Berdasarkan kesimpulan yang telah disimpulkan oleh peneliti, maka peran kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) sebagai pendampingan masyarakat desa sudah maksimal dalam menjalankan peranan tugasnya.

5.2 Saran.

Saran yang dapat peneliti paparkan di tujukan kepada kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD), dan pihak yang bersangkutan dalam kegiatan pelatihan yaitu:

1. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan Pemerintah Desa Sumberkerang, seharusnya tetap mengawasi kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan pelatihan, namun dalam mengembangkan hasil dari pelatihan tidak di kembangkan, maka peran KPMD harus tetap mengawasi dan memberikan inovasi baru agar kelompok masyarakat Desa Sumberkerang lebih banyak yang mandiri.
2. Pemerintah desa, sebagai penunjang dana anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan di bidang pemberdayaan masyarakat, seharusnya lebih memberikan dana anggaran dengan waktu yang tepat, agar pelaksanaan kegiatan pelatihan segera terlaksana sesuai dengan waktu yang telah di jadwalkan, serta lebih memper-aktifkan program/kegiatan dari bidang pemberdayaan masyarakat desa.
3. Pemerintah Desa Sumberkerang, memberikan bantuan maupun modal kepada kelompok masyarakat desa yang mengikuti kegiatan pelatihan dan membuka usaha maupun jasa di rumahnya sendiri.
4. Mengembangkan keterampilan masyarakat Desa Sumberkerang dengan memberikan pelatihan yang memanfaatkan produk milik desa sendiri.
5. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD sebagai pendampingan masyarakat desa, seharusnya membuka maupun membangun usaha kecil bagi

kelompok masyarakat desa yang kurang produktif dengan memanfaatkan lahan maupun produk desa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bandur, Agustinus. 2016. *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVivo 11 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Firdaus. dan F. Zamzam. 2018. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ghozali, Abdullah. 2015. *Kader Desa: Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementrian Desa.
- Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Jafar, Marwan. 2015. *Kader Desa: Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementrian Desa.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publication.
- Moleong, L. J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-31. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. 2009. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Gahlia Indonesia.
- Nazir, M. 2014. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Gahlia Indonesia.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Penerbit Erlangga.
- Rosidi dan Fajrina. 2013. *Reinventing Government: Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Andi Publisher.

- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surjono dan Trilaksono. 2008. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V, W. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Syafrri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jatinangor: Erlangga.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- Usman dan Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjaja, HAW. 2011. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Wicaksono, W. K. 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Yabbar dan Hamzah. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Surabaya: Penerbit Pustaka.

Dokumen

- Keputusan Kepala Desa Sumberkerang Pengangkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. (SK. Kepala Desa Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2016-2021).
- Lampiran Keputusan Kepala Desa Sumberkerang (Daftar Pengangkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Masa Bhakti 2016-2021).
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD-Desa) Tahun 2015-2021.

Peraturan Perundang-Undang.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.

Jurnal Ilmiah.

Mutiawanthi. 2017. Tantangan “Role”/ Peran Yang Dihadapi Oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali Ke Indonesia. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*. 4 (2): 104-114.

Syahri Alfi. M. 2018. Peran Dan Wewenag Majelis Tuha Peut Dalam Membuat Kebijakan Partai Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*. (3): 1-22.

Agustina Lidya. 2009. Pengaruh Konflis Peran “Ketidakjelasan peran, Dan Kelebihan Peran Terhadap Kepuasan Kerja Dan Kinerja Auditor. Kantor Akuntan Publik Bermitra Dengan Kanton Akuntan Publik Big Four Di Wilayah DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi*. 1 (1): 40-69.

Internet.

Djohani. R. 2008. Paduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. <http://kawasan.bappenas.go.id/images/data/Produk/PanduanMusrenbang/MusrenbangDesa.pdf>. (Diakses pada 2 Februari 2019)

Krystyanto. T. 2016. Materi TOT Bagi KPMD. <https://www.slideshare.net/TeguhKristyanto/materi-tot-bagi-kpmd>. (Diakses pada 5 Maret 2019),

Maratussolikah, Binti. 2018. Unsur-unsur Pemerintahan Desa Yang Terdiri Dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa, Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. <https://www.daunpendidikan.com/2018/03/unsur-unsur-pemerintahan-desanya.html>. (Diakses pada 03 Maret 2019).

Mutiawanthi. 2017. Tantangan “Role”/ Peran Yang Dihadapi Oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali Ke Indonesia. <http://jurnal.uai.ac.id/index.php/SH/article/download/265/250>. (Diakses jam 00:21. Pada tanggal 05 Mei 2019)

Ambiyan, Muhidin. 2017. Materi Kelembagaan Desa. <https://www.scribd.com/document/227385371/Materi-Kelembagaan-Desa>. (Diakses jam 21:15. Pada tanggal 22 Juli 2019).

<https://desamekarkondang.wordpress.com/pemerintahan-desa/kaur-perencanaan/>.

(Diakses jam 22:20. Pada tanggal 22 Juli 2019).

<https://updesa.com/tugas-kepala-dusun/>. (Diakses jam 22:35. Pada tanggal 22 Juli 2019).



LAMPIRAN





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id-pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 1246 /UN25.3.1/LT/2019
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

29 April 2019

Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Probolinggo
Di
Probolinggo

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 1552/UN25.1.2/LT/2019 tanggal 25 April 2019 perihal Permohonan Ijin Penelitian,

Nama : Warda Sayyidatun Nisa'
NIM : 150910201024
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Ds. Sumberkerang RT.01 RW.06 Gending-Probolinggo
Judul Penelitian : "Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat"
Lokasi Penelitian : Kantor Desa Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo
Lama Penelitian : 3 Bulan (8 Mei-8 Agustus 2019)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

a.n. Ketua
Sekretaris II,



Susanto, M.Pd.
NIP. 196306161988021001

- Tembusan Yth
1. Kepala Desa Sumberkerang, Gending-Probolinggo;
 2. Dekan FISIP Universitas Jember;
 3. Mahasiswa ybs;
 4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Ahmad Yani 23 – Telpn (0335) 421440-434455

PROBOLINGGO

SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY/RESEARCH

Nomor : 072 / 066D / 426.204/ 2019

- Membaca : Surat dari : **LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS JEMBER** Tertanggal , 29 April 2019 Nomor : 1219-UN25.3.1/LT/2019 Perihal : *Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian.*
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 18 Tahun 2002 Tentang sistim Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 25 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Probolinggo.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN** dilakukan Survey/Research oleh ;
Nama Peneliti / Penanggung Jawab : **WARDA SAYYIDATUN NISA'**
NIDN/NIM. : 150910201024
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa
Alamat : Dusun Kubat , Rt/Rw 001/006, Desa.Sumberkerang, Kec. Gending, Kab. Probolinggo.

Thema/Acara Survey/Resarch : **PERAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPM) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.**

Daerah / tempat dilakuar. Survey / Research : Desa Sumberkerang Kec.Gending, Kab. Probolinggo.
Lamanya Survey / Research : Ijin berlaku 3 (Tiga) bulan sejak surat di keluarkan.
Pengikut peserta Survey / Research : -

Dengan *ketentuan, sebagai berikut*

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan, melaporkan kedatangannya kepada Pejabat setempat.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesucilaan, serta menghindari pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan maupun / menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan survey / research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research sebelum meninggalkan daerah survey / research.
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan survey / research diwajibkan memberikan laporannya secara tertulis tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada Bupati Probolinggo Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Probolinggo, 23 Mei 2019

**KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PROBOLINGGO**

TEMBUSAN :

1. Ibu. Bupati Probolinggo (sebagai laporan)
2. Sdr. Komandan Kodim 0820 Prob,
3. Sdr. Kapolres Probolinggo
4. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab Probolinggo.
5. Sdr. Forkopimka Kec.Gending.
6. Sdr. Kepala Desa Sumberkerang.
7. Sdr. Ketua.Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Ma: yarakat UNIV Jember ;
8. Yang bersangkutan.


UG. TOHRWANTO, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690515 199003 1 009

Digital Repository Universitas Jember

Dokumen Matriks ABDesa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017.

Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan						
	1 PAUD	6.000.000			6.000.000	DD
	2 Perpustakaan Desa	2.474.000			2.474.000	DD
	3 Pengadaan dan Pengelolaan Sanggar Belajar, Sanggar Seni Budaya	11.300.000			11.300.000	DD
Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Ekonomi						
	1 Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa		15.000.000		15.000.000	DD
an rakat	Linmas	1.092.000			1.092.000	ADD
	Lomba Desa			2.473.000	2.473.000	ADD
	Gotongroyong			4.460.000	4.460.000	ADD
	Pelaksanaan Desa Siaga		4.192.000		4.192.000	ADD
ayaan rakatan	1 Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa	10.000.000	5.000.000		15.000.000	DD
	2 Peningkatan Kapasitas Masyarakat					
	PKK	14.008.650	20.539.350		34.548.000	DD
	LKD	4.425.800	4.387.100		8.812.900	DD
	Karang Taruna	34.087.000	1.108.000		35.195.000	DD
	KPMD	2.104.500			2.104.500	DD
	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kelompok Pengrajin	1.775.000			1.775.000	DD
Fasilitasi-fasilitas terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel (Karang Werda)	47.500.000			47.500.000	DD	
ak						
	Belanja Tidak Terduga			9.611.965	9.611.965	ADD
2,50%						
811.965						
TOTAL	1.286.595.448	649.144.600	555.576.050	81.874.765	1.286.595.416	

478 (437) 53 95

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa Sumberkerang

ABDULLAH HIDAYATI

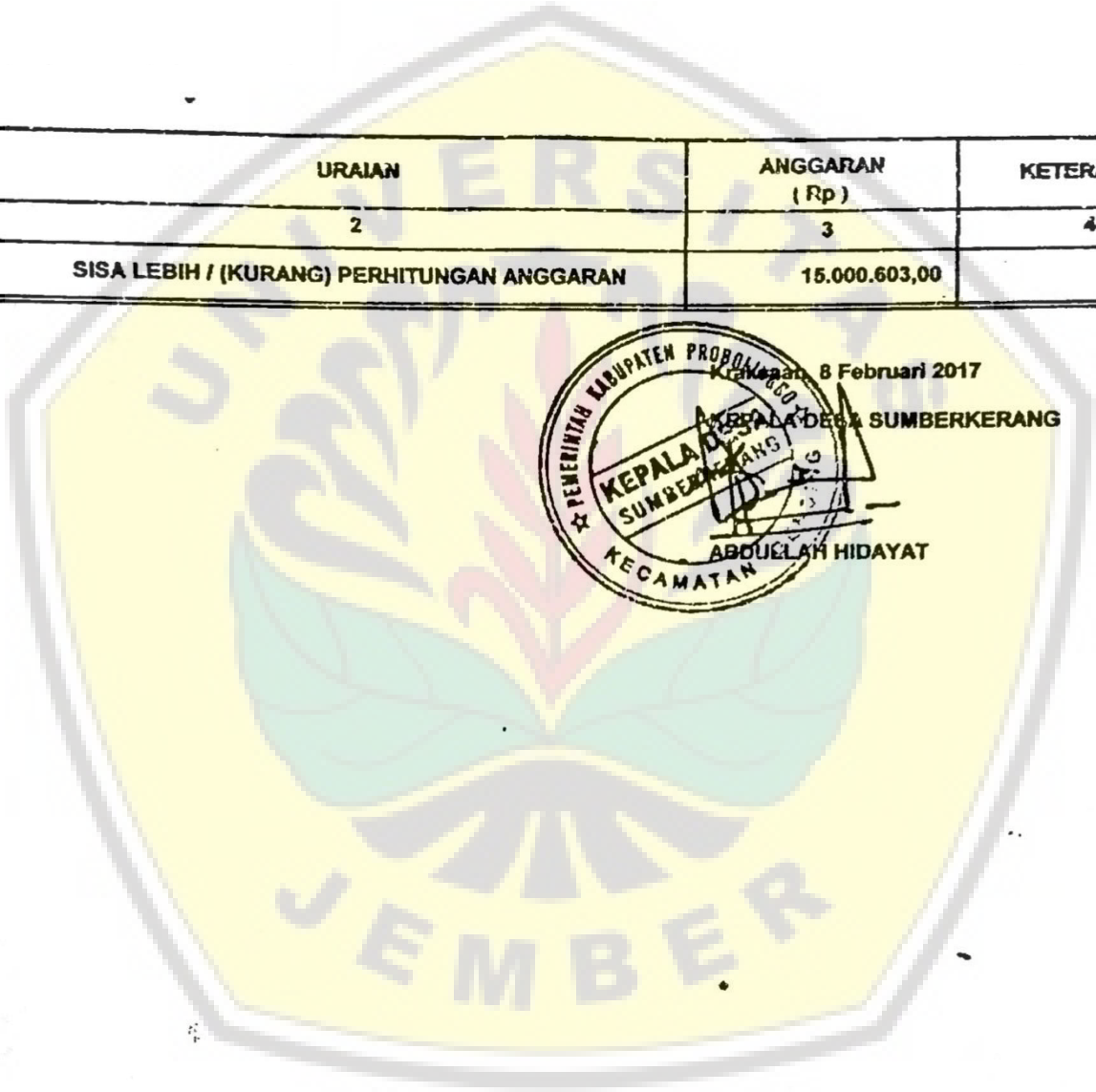
Dokumen APBDesa Bidang pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018.

2.4	<u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u>	<u>146.434.900,00</u>
2.4.2	Kegiatan Pengorganisasian melalui Pembentukan dan Fasilitasi	8.812.900,00
2.4.2.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	8.812.900,00
2.4.2.2.2	Belanja Alat Tulis Kantor	412.900,00
2.4.2.2.7	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00
2.4.2.2.15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	6.600.000,00
2.4.5	Kegiatan Fasilitas fasilitas terhadap kelompok-kelompok n	47.500.000,00
2.4.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	47.500.000,00
2.4.5.2.6	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	600.000,00
2.4.5.2.7	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.250.000,00
2.4.5.2.11	Belanja Sewa Peralatan	4.600.000,00
2.4.5.2.14	Belanja Honorarium Tim Panitia	1.650.000,00
2.4.5.2.15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	29.400.000,00
2.4.12	Kegiatan Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala	15.000.000,00
2.4.12.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	15.000.000,00
2.4.12.2.25	Belanja Uang Saku Peserta Pelatihan/Bimtek/training	15.000.000,00
2.4.13	Kegiatan Peningkatan kapasitas masyarakat kepada kader p	2.104.000,00
2.4.13.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.104.000,00
2.4.13.2.2	Belanja Alat Tulis Kantor	118.500,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.4.13.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	187.500,00	
2.4.13.2.15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.800.000,00	
2.4.14	Kegiatan Peningkatan kapasitas masyarakat kelompok usat	1.775.000,00	
2.4.14.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.775.000,00	
2.4.14.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525.000,00	
2.4.14.2.15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.250.000,00	
2.4.18	Kegiatan Peningkatan kapasitas masyarakat kelompok pere	36.048.000,00	
2.4.18.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	22.375.500,00	
2.4.15.2.2	Belanja Alat Tulis Kantor	1.375.500,00	
2.4.15.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	
2.4.15.2.15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	16.800.000,00	
2.4.15.3.	<i>Belanja Modal</i>	13.672.500,00	
2.4.15.3.16	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.500.000,00	
2.4.15.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio	2.672.500,00	
2.4.15.3.36	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	9.500.000,00	
2.4.21	Kegiatan Peningkatan kapasitas masyarakat kelompok pem	35.195.000,00	
2.4.21.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.195.000,00	
2.4.21.2.2.	Belanja Alet Tulis Kantor	395.000,00	
2.4.21.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000,00	
2.4.21.2.15	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.050.000,00	
2.4.21.3.	<i>Belanja Modal</i>	33.000.000,00	
2.4.21.3.19	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.000.000,00	
2.5	<u>Bidang Tidak Terduga</u>	9.611.965,00	
2.5.1	Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam	9.611.965,00	
2.5.1.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	9.611.965,00	
2.5.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Dibenkan Kepada Masyarakat	9.611.965,00	
	JUMLAH BELANJA	1.295.282.315,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.686.806,00)	
3.	PEMBIAYAAN		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	23.687.409,00	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	8.687.409,00	
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	15.000.000,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	23.687.409,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	15.000.603,00	

Kecamatan, 8 Februari 2017
KEPALA DESA SUMBERKERANG
ABDUELAH HIDAYAT
KECAMATAN



Dokumen APBDesa Kuitansi Pengeluaran kegiatan Pelatihan Tahun 2017.

PEMERINTAH DESA SUMBERKERANG		
KUITANSI PENGELUARAN		
NOMOR : 000656/KWT/18.09/2017		
Sudah diterima dari	: BENDAHARA	
Uang sejumlah	: == Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah ==	
Kegiatan/Program	: Pembelian Bahan Praktik Pelatihan Menjahit	
Barang yang dibelanjakan		
Banyaknya nama Barang	Harga	Jumlah
7 Pak tepak pensil	21.00	147.000
7 Buah metlin/meteran	12.00	84.000
21 Buah pensil	4.000	84.000
21 Buah spidol	2.000	42.000
7 Buah penghapus	2.500	17.500
8 Buah glukol	3.500	28.000
7 Buah gunting + cliper	15.000	105.000
7 Buah pendedel	15.000	105.000
3 Buah gunting kain	50.000	150.000
8 Buah jarum	1.500	12.000
14 Penggaris	1.500	12.000
20 Kertas mal manila	2.000	40.000
10 Kertas mal spont Hr 2x		50.000
10 Kertas karton	2.000	20.000
Belanja Kain		3.689.000
		4.585.500

PEMERINTAH DESA SUMBERKERANG

KUITANSI PENGELUARAN

NOMOR : 000656/KWT/18.09/2017

Sudah diterima dari : BENDAHARA

Uang sejumlah : **== Satu Juta Sembilan Puluh Empat Lima Ribu Rupiah ==**

Kegiatan/Program : Pembelian Bahan Praktik Pelatihan Membuat Kue

Barang yang dibelanjakan

Banyaknya Nama Barang	Harga	Jumlah
7 Kg Tepung	9.000	63.000
7 Kg Tepung Beras	15.000	105.000
9 Kg gula	12.000	108.000
8 Buah vanili	1.500	12.000
12 Buah cetakan kue	2.000	24.000
4 Buah baki/talam	45.000	180.000
6 Buah piring hias	25.000	150.000
3 Buah panci kukus besar	75.000	225.000
7 Buah kain lap	5.000	35.000
3 Bungkus jagung manis	6.000	18.000
5 Buah pisang	22.500	112.500
5 Buah Labu	20.000	100.000
3 Kg telur	25.000	75.000
3 Buah kompor gas	120.000	360.000
2 Bungkus garam	2.000	4.000
2 Buah susu cair 900 ml	21.500	42.000
6 Sacset susu bubuk	2.500	15.000



2 Buah mentega 500 gr	10.000	20.000
2 Buah keju	15.000	30.000
4 Tangkai saladri	1.000	4.000
¼ tomat		5.000
2 buah sacset susu milk	1.500	3.000
3 Ruas pandan wangi	1.000	3.000
1 Ikat kelor		3.000
2 Buah ceri	3.000	6.000
1 Pack permen yupi		8.500
1/5 kilo 500 gram		25.000
2 Buah jeruk	1.500	3.000
2 Buah oven	75.000	150.000
Daging ayam 1 kl		34.000
1 Kilo wortel		7.000
1 Kilo kentang		6.000
1 Kilo buncis		9.000
		1.945.000

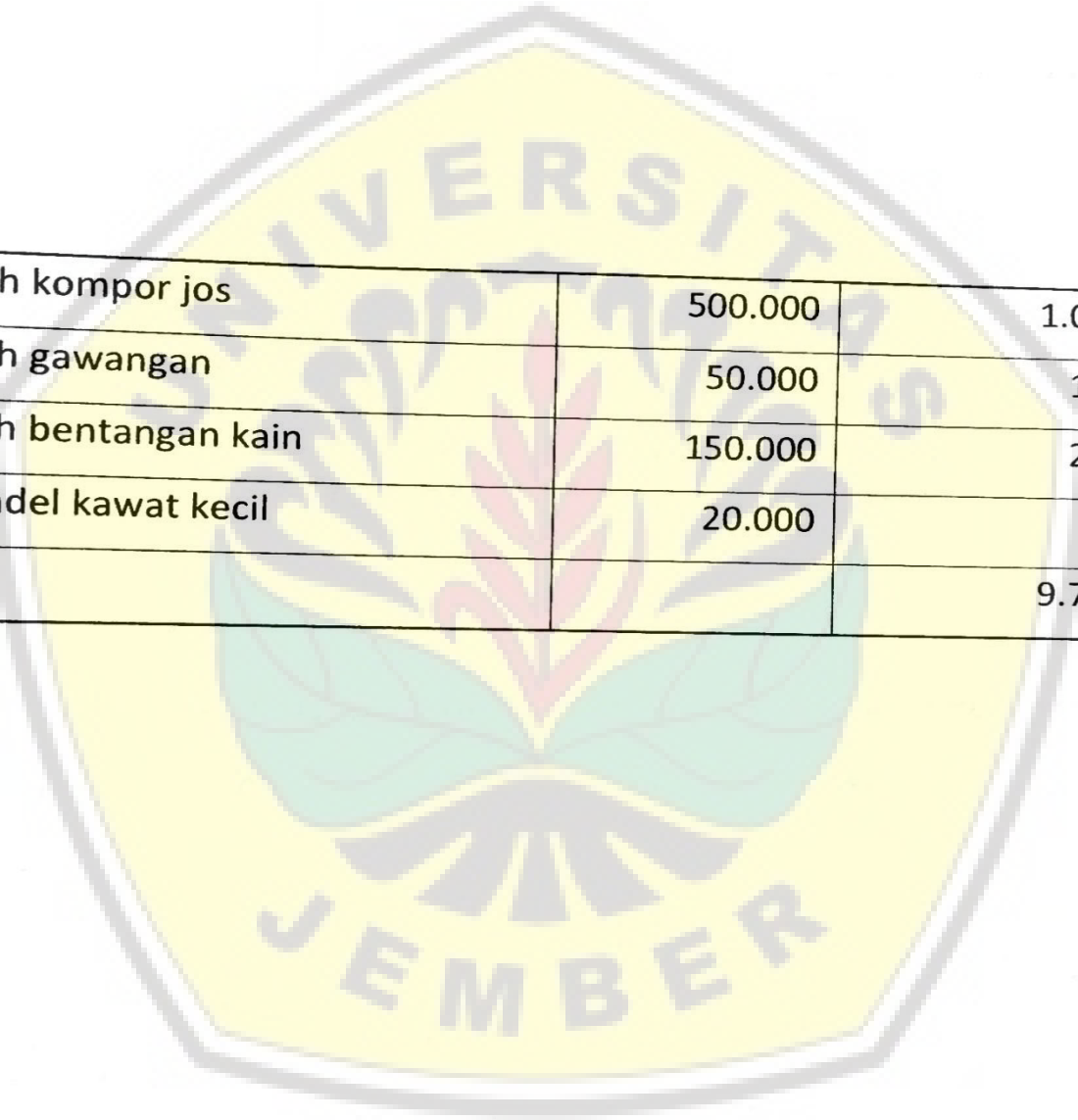
Dokumen APBDesa Kuitansi Pengeluaran kegiatan Pelatihan Tahun 2018

PEMERINTAH DESA SUMBERKERANG

KUITANSI PENGELUARAN
NOMOR : 000656/KWT/18.09/2018

Sudah diterima dari : BENDAHARA
Uang sejumlah : **== Sembilan Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah ==**
Untuk pembayaran : Pembelian Bahan Praktik Pelatihan Membatik
Barang yang dibelanjakan :

Banyaknya Nama Barang	Harga	Jumlah
3 Buah canting elektrik	350.000	1.050.00
2 Kg pewarna hitam	400.000	800.000
2 Kg pewarna biru elektrik	650.000	1.300.000
2 Kg Pewarna merah	280.000	560.000
2 Kg pewarna kuning	250.000	500.000
2 Kg Pewarna coklat	280.000	560.000
2 Kg Pewarna buru turkey	350.000	700.000
30 Meter kain batik	37.000	1.110.00
3 Liter water glas/obat batik	10.000	30.000
2 Buah timbangan elektrik	250.000	500.000
2 Kg nalam	45.00	90.000
10 Biji kuas kecil	2.000	20.000
2 Soda as	40.000	80.000
10 Buah sarung tangan	18.000	180.000
10 Biji kuas besar	15.000	150.000
2 Buah bak besar	35.000	70.000
2 Biji panic besar	300.000	600.000



2 Buah kompor jos	500.000	1.000.000
8 Buah gawangan	50.000	150.000
2 Buah bentangan kain	150.000	200.000
3 Bundel kawat kecil	20.000	60.000
		9.710.000

PEMERINTAH DESA SUMBERKERANG

KUITANSI PENGELUARAN

NOMOR : 000656/KWT/18.09/2018

Sudah diterima dari : BENDAHARA

Uang sejumlah : **== Delapan Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah ==**

Untuk pembayaran : Pembelian Bahan Praktik Pelatihan Bawang Goreng

Barang yang dibelanjakan :

Banyaknya Nama Barang	Harga	Jumlah
20 Kg bawang merah	20.000	400.000
20 Liter minyak goreng	12.000	240.000
2 Kg tepung	13.000	26.000
1 Bungkus garam	5.000	5.000
7 Buah wajan ukuran 26	217.000	1.519.000
7 Buah pasrah/alat iris	137.000	959.000
7 Buah serok kasar	40.000	280.000
7 Buah serok halus	50.000	350.000
7 Buah kompor jos	210.000	1.470.000
56 Meter selang	22.000	1.232.000
7 Buah regulator	95.000	665.000
7 Buah tabung gas	165.000	1.155.000
7 Buah sotel	37.000	295.000
7 Buah baki/talam	45.000	315.000
7 Buah timba	25.000	175.000
1 Buah mesin spiner kapasitas 1,5 KG	2.750.000	2.750.000
		18.875.000

Daftar Hadir Kegiatan Pelatihan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pada Tahun 2017

DAFTAR HADIR PELATIHAN MENJAHIT

Kegiatan : Pelatihan Menjahit
Tempat : Rumah Kepala Desa Sumberkerang
Pukul : 09.00 WIB
Tahun : 2017

No	Nama	Umur	Alamat	
1	Listiani	26 Tahun	Dusun Krajan	✓
2	Yuliana Firda	30 Tahun	Dusun Krajan	✓
3	Agustin Nur Jannah	20 Tahun	Dusun Kubat	✓
4	Sholihah	30 Tahun	Dusun Kubat	✓
5	Sumina	33 Tahun	Dusun Karnin Wetan	✓
6	Nur Chasanah	20 Tahun	Dusun Karnin Wetan	✓
7	Endang	28 Tahun	Dusun Sumberan	✓
8	St. Fatimah	20 Tahun	Dusun Sumberan	✓
9	Ella Husna	25 Tahun	Dusun Karnin Kulon	✓
10	Faiqoh Himmah	22 Tahun	Dusun Karnin Kulon	✓
11	<i>Varyati</i>	28 Tahun	Dusun Triwungan	✓
12	Novilia Eka P	26 Tahun	Dusun Triwungan	✓
13	Nur Farida	25 Tahun	Dusun Talang	✓
14	Ismi Mahmudah	24 Tahun	Dusun Talang	✓

DAFTAR HADIR PELATIHAN MEMBUAT KUE

Kegiatan : Membuat Kue
Tempat : Rumah Kepala Desa Sumberkerang
Pukul : 09.00 WIB
Tahun : 2017

No	Nama	Umur	Alamat
1	Fatimatuz Zahro	26 Tahun	Dusun Krajan
2	Gilva Sabilya	21 Tahun	Dusun Krajan
3	Nurul Faizatul J.	24 Tahun	Dusun Kubat
4	Sulistiani	29 Tahun	Dusun Kubat
5	Yuliana	27 Tahun	Dusun Karnin Wetan
6	Siti Kurrotul Aini	20 Tahun	Dusun Karnin Wetan
7	Puspita Dewi	26 Tahun	Dusun Sumberan
8	Alfi Kurniati Ali	20 Tahun	Dusun Sumberan
9	Uswatun Hasanah	20 Tahun	Dusun Karnin Kulon
10	Asmiati	30 Tahun	Dusun Karnin Kulon
11	Lisa Haryati	26 Tahun	Dusun Triwungan
12	Maratul Sholehah	21 Tahun	Dusun Triwungan
13	Etik Agustin	21 Tahun	Dusun Talang
14	Jumani	30 Tahun	Dusun Talang

Daftar Hadir Kegiatan Pelatihan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pada Tahun 2018

DAFTAR HADIR PELATIHAN MEMBATIK

Kegiatan : Pelatihan Membatik
Tempat : Rumah Kepala Desa Sumberkerang
Pukul : 09.00
Tahun : 2018

No	Nama	Umur	Alamat
1	Nur Hayati	27 Tahun	Dusun Krajan ✓
2	Layli Octoberiana S.	20 Tahun	Dusun Krajan ✓
3	Enik Sukma	30 Tahun	Dusun Kubat ✓
4	Adila	20 Tahun	Dusun Kubat ✓
5	Dafinda Nova	25 Tahun	Dusun Karnin Wetan ✓
6	Mutmainnah	29 Tahun	Dusun Karnin Wetan ✓
7	Khoiriyah	30 Tahun	Dusun Sumberan ✓
8	Dewi Kusniati	28 Tahun	Dusun Sumberan ✓
9	Sumiati	30 Tahun	Dusun Karnin Kulon ✓
10	Yuliana	25 Tahun	Dusun Karnin Kulon ✓
11	Nafiyatul Ulya	28 Tahun	Dusun Triwungan ✓
12	Dian Cahya	26 Tahun	Dusun Triwungan ✓
13	Lisdamayanti	29 Tahun	Dusun Talang ✓
14	Intania Rifki	20 Tahun	Dusun Talang ✓

DAFTAR HADIR PELATIHAN BAWANG GORENG

Kegiatan : Pelatihan Bawang Goreng
Tempat : Rumah Kepala Desa Sumberkerang
Pukul : 09.00 WIB
Tahun : 2018

No	Nama	Umur	Alamat	
1	Nabila	24 Tahun	Dusun Krajan	✓
2	Asminari	34 Tahun	Dusun Krajan	✓
3	Izzatul Hasanah	30 Tahun	Dusun Kubat	✓
4	Ayu Astari	27 Tahun	DusunKubat	✓
5	Nazilah	26 Tahun	Dusun Karnin Wetan	✓
6	Weniyati	29 Tahun	Dusun Karnin Wetan	✓
7	Sulis Hernandi	25 Tahun	Dusun Sumberan	✓
8	Fatmawati	30 Tahun	Dusun Sumberan	✓
9	Danik Rahmawati	28 Tahun	Dusun Karnin Kulon	✓
10	Kusniawati	36 Tahun	DusunKarnin Kulon	✓
11	Dwi Anggraini	25 Tahun	Dusun Triwungan	✓
12	Imawati Yuliana	27 Tahun	Dusun Triwungan	✓
13	Dinar Nur Faiza	25 Tahun	Dusun Talang	✓
14	Tutik Qomariah	29 Tahun	Dusun Talang	✓



**KEPALA DESA SUMBERKERANG
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKERANG
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
MASA BHAKTI 2016 SAMPAI DENGAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUMBERKERANG ,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu melakukan penyesuaian pengangkatan Kader Pemberdayaan masyarakat Desa agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Masa Bhakti 2016 sampai dengan 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat ;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Desa Sumberkerang tentang pengangkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Masa Bhakti 2016 sampai dengan 2021 ;
- KEDUA : Mengangkat yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Masa Bhakti 2016 sampai dengan 2021 ;

- KETIGA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Masa Bhakti 2016 sampai dengan 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaksanakan tugas dan memperoleh hak sesuai peraturan perundang-undangan ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Sumberkerang

Pada tanggal : 16 Januari 2016

KEPALA DESA SUMBERKERANG

ABDULLAH HIDAYAT

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Probolinggo;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Probolinggo;
4. Camat Gending;
5. Ketua BPD Desa Sumberkerang;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKERANG

Nomor : 01 Tahun 2016

Tanggal : 16 Januari 2016

DAFTAR PENGANGKATAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MASA BHAKTI 2016 SAMPAI DENGAN 2021

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Alamat	Jabatan
1.	EKA WAHYUDI, S.Pd.SD.	Probolinggo, 18-05-1987	Dusun Karnin Kulon RT.04 RW.03	KPMD
2.	MAHFUD	Lumajang, 07-08-1981	Dusun Kubat RT.01 RW.06	KPMD
3	SITI SULAIHA	Probolinggo, 15-10-1976	Dusun Karnin Wetan RT.02 RW.02	KPMD
4	PUTRI SIWI MEIDAR	Probolinggo, 14-05-1989	Dusun Kubat RT.01 RW.06	KPMD
5	NOVITA RAHMAN	Probolinggo, 31-07-1995	Dusun Triwungan RT.03 RW.04	KPMD

Wawancara Dengan Kepala Desa Dan Ibu Kepala Desa Sumberkerang.



Wawancara Dengan Pemerintah Desa Bagian Kaur Keuangan Desa Sumberkerang.



Wawancara Dengan Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.



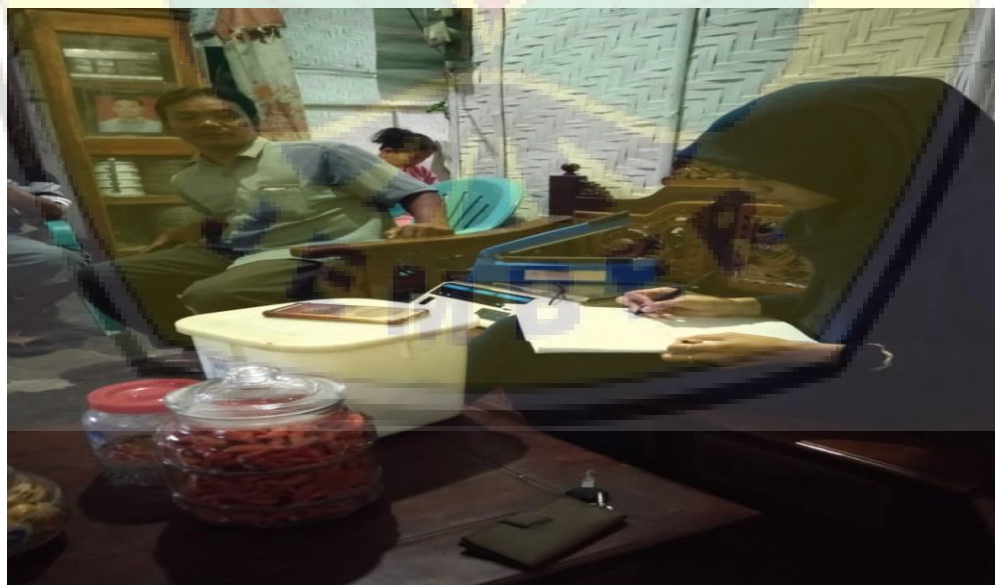
Wawancara Dengan Pelatih dari Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat.



Wawancara Dengan Usaha Dibidang Kuliner.



Wawancara Dengan Usaha Dibidang Pertanian (Bawang Goreng).



Wawancara Dengan Kelompok Masyarakat Desa Yang mengikuti Pelatihan.

